



LKjIP

TAHUN 2021



BPMI Setpres ©2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021

EXECUTIVE SUMMARY

Pelaporan Kinerja Pemerintah melalui Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan yang bersih dan baik (clean and good governance) harus konsisten terus dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Tapin berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (Good Governance) dan berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government) sesuai dengan kewenangan dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023. Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan lima tahun kedepan maka telah ditetapkan 5 Misi, 6 Tujuan, 23 Sasaran Strategis dan 34 Indikator Kinerja Utama. Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja utama untuk tahun ketiga (tahun 2021) periode perencanaan 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- **Misi 1 terdapat 1 tujuan, 5 sasaran dan 8 indikator kinerja utama:**
 - Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada Misi 1 sebesar 114,93%.
 - Terdapat 2 Indikator dengan nilai capaian kategori Baik Sekali (BS) atau (capaian kinerja lebih dari 100 %) dan 6 indikator kinerja utama dengan nilai capaian kategori Baik atau (capaian kinerja lebih dari 75 % sd. 100 %)
- **Misi 2 terdapat 1 tujuan, 7 sasaran dan 12 indikator kinerja utama:**
 - Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada Misi 2 sebesar 89,99%
- Terdapat 5 Indikator dengan nilai capaian kategori Baik Sekali (BS) atau (capaian kinerja lebih dari 100 %), 3 indikator kinerja utama dengan nilai capaian kategori Baik atau (capaian kinerja lebih Lebih dari 75 % sd. 100 %), 3 indikator kinerja utama dengan nilai capaian kategori Cukup (capaian kinerja dari 55 % sd. 75 %)
- **Misi 3 terdapat 2 tujuan, 7 sasaran dan 9 indikator kinerja utama:**
 - Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada Misi 3 sebesar 92,54%

- Terdapat 5 Indikator dengan nilai capaian kategori Baik Sekali (BS) atau (capaian kinerja lebih dari 100 %), 3 indikator kinerja utama dengan nilai capaian kategori Baik atau (capaian kinerja lebih Lebih dari 75 % sd. 100 %), 1 indikator kinerja utama dengan nilai capaian kategori Cukup (capaian kinerja dari 55 % sd. 75 %) dan 1 indikator kinerja utama dengan nilai capaian kategori Kurang (capaian kinerja kurang dari 55 %).
- **Misi 4 terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja utama:**
 - Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada Misi 4 sebesar 127,45 %
 - 1 indikator kinerja utama dengan nilai capaian kategori Baik Sekali (BS) atau (capaian kinerja lebih dari 100 %).
- **Misi 5 terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator kinerja utama:**
 - Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada Misi 5 sebesar 79,21 %
 - Terdapat 1 indikator kinerja utama dengan nilai capaian kategori Baik Sekali (BS) atau (capaian kinerja lebih dari 100 %), 2 indikator kinerja utama dengan nilai capaian kategori Baik atau (capaian kinerja lebih Lebih dari 75 % sd. 100 %) dan 1 indikator kinerja utama dengan nilai capaian kategori Kurang (capaian kinerja kurang dari 55 %).

Dari hasil pengukuran kinerja masih terlihat adanya kekurang berhasilan yang ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja sasaran di bawah seratus persen. Hal tersebut akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tapin dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021 sebesar 91,66 %. Tercapainya capaian kinerja Sasaran ini karena adanya komitmen dari seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Tapin dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja akan menjadi prioritas perbaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin ke depan.

Rantau, Maret 2022


BUPATI TAPIN

Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-NYA kita dapat menyusun Laporan Kinerja Kabupaten Tapin Tahun 2021. Shalawat dan Salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat, Kerabat, Pengikut Beliau dari dahulu, sekarang, dan sampai akhir nanti.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tapin ini merupakan media pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menjalankan roda Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Laporan ini memuat informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan ataupun kegagalan dalam Pemerintah Kabupaten Tapin dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya dalam pencapaian visi dan misi serta agenda pembangunan daerah yang dijabarkan melalui program-program pembangunan.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Tapin tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta, dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tapin Tahun 2022.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Rantau, Maret 2022

BUPATI TAPIN



Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM



DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY	2
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR LAMPIRAN	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. LATAR BELAKANG.....	8
1.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	8
1.3. KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH	12
1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH	15
2.2. TUJUAN DAN SASARAN	22
2.3. PERENCANAAN KINERJA.....	25
2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	28
BAB III 30	
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	30
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	31
A. <i>Indeks Pembangunan Manusia</i>	36
B. <i>Harapan Lama Sekolah</i>	37
C. <i>Angka Rata-rata Lama Sekolah</i>	38
D. <i>Angka Partisipasi Murni</i>	39
E. <i>Angka Partisipasi Kasar</i>	40
F. <i>Angka Kelangsungan Hidup Bayi</i>	41
G. <i>Angka Usia Harapan Hidup</i>	41
H. <i>Prevalensi Stunting</i>	42
I. <i>Rasio Penduduk Yang Bekerja</i>	43
3.1.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021	44
3.2 PENGUKURAN KINERJA ATAS PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021	54
3.3 EVALUASI DAN ANALISIS PENGUKURAN KINERJA ATAS PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021	59
3.4 REALISASI ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	115
3.5 DAFTAR PRESTASI TINGKAT NASIONAL/PROVINSI	129
BAB IV PENUTUP.....	135
LAMPIRAN – LAMPIRAN	136



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perumusan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin 2018-2023	16
Tabel 2. Penyusunan Penjelasan Visi	18
Tabel 3. Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah	19
Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	26
Tabel 5. Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama	28
Tabel 6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapin	32
Tabel 7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapin	32
Tabel 8 PDRB Perkapita ADHB dan PDRB Perkapita ADHK	33
Tabel 9 Nilai Inflasi Kabupaten Tapin dan Nasional	34
Tabel 10 Koefisien Gini Kabupaten Tapin	35
Tabel 11 Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020	35
Tabel 12 Data IPM Kabupaten Tapin	37
Tabel 13 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah	37
Tabel 14 Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapin	38
Tabel 15. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tapin dan	39
Tabel 16 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tapin dan	40
Tabel 17. Angka Kelangsungan Hidup Bayi	41
Tabel 18. Prevalensi Stunting	42
Tabel 19. Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja	44
Tabel 20. Capaian IKU Pemerintah Kabupaten Tapin 2021	45
Tabel 21 Pengukuran Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021	55
Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 1	60
Tabel 23. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD Misi 1	60
Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 2	71
Tabel 25. Perbandingan Relalisasi Kinerja dengan Target RPJMD	72
Tabel 26 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD	90
Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	106
Tabel 28. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD	107
Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 5	108
Tabel 30. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD Misi 5	108
Tabel 31 Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi	115



DAFTAR LAMPIRAN

Error! Bookmark not defined.

Lampiran 1. Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Daerah	137
Lampiran 2. Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Daerah	145
Lampiran 3. Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Daerah	156
Lampiran 4. Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Daerah	165
Lampiran 5. Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Daerah	166
Lampiran 6. Surat Keputusan Bupati Tapin tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021	171
Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021	182

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Perjanjian kinerja dimaksud telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya anggaran baik dari APBD maupun sumber dana lainnya serta berpedoman pada Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

1.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan (gap expectation) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi

riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) masih menjadi permasalahan utama dan telah menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang semakin besar, sehingga perlunya upaya-upaya dalam pemulihan kembali aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Beberapa permasalahan Kabupaten Tapin berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan 5 (lima) tahun disajikan sebagai berikut :

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia Kabupaten Tapin tahun 2019 berada pada peringkat ke empat dengan nilai 70,13, sementara untuk target di tahun 2021 adalah sebesar 70,65

b. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin tahun 2019 berada pada peringkat ke delapan dengan nilai 4,26 atau bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 5,01 turun sebesar 0,75. Sementara untuk target di Tahun 2021 akibat adanya pandemi Covid-19 diperkirakan turun menjadi 3,5 persen.

c. Bidang Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang Pendidikan yaitu Harapan lama sekolah Kabupaten Tapin berada pada peringkat 13 dari 13 Kabupaten/Kota dengan nilai 11,86. Penyebab rendahnya angka Harapan lama sekolah antara lain masih banyaknya anak usia sekolah yang menikah dan adanya anak sekolah yang melanjutkan pendidikan ke lembaga pendidikan non-

formal seperti ke pesantren. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Tapin selama periode tahun 2018-2019 masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Data tahun 2019 angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 8,20 sedangkan Kabupaten Tapin sebesar 7,75.

Adapun permasalahan lain yang muncul dengan adanya Pandemi Covid-19 saat ini di bidang pendidikan diantaranya kegiatan belajar mengajar menjadi terhenti untuk sementara waktu dan digantikan dengan sistem pembelajaran secara daring, dimana sistem pembelajaran tersebut tidak bisa diakses oleh semua siswa

d. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Tapin yaitu pada tahun 2019 jalan dalam kondisi mantap sebesar 63,88% dan Jembatan dalam kondisi baik sebesar 55,43%. Cakupan layanan air bersih di Kabupaten Tapin juga masih cukup rendah yaitu sebesar 59,65%, lebih rendah dari target yang di tetapkan pada RPJMD sebesar 63%. Hal ini terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih dengan penyediaan anggaran baik yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, serta dari pihak swasta guna mendukung target pemerintah cakupan air minum layak 100% di tahun 2024. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, dikhawatirkan pembangunan yang bersifat fisik tidak dapat berjalan maksimal.

e. Bidang Tenaga Kerja

Pandemi Covid-19 berdampak buruk pada perekonomian yang secara tidak langsung mempengaruhi naiknya tingkat pengangguran di Kabupaten Tapin yang di proyeksikan mengalami kenaikan dari 3,80 persen menjadi 4,25 persen.

f. Bidang Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten tapin dari tahun 2017-2019 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 IKLH sebesar 62,98, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 61,47 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 62,06. Ditargetkan untuk tahun 2021 terjadi peningkatan IKLH Kabupaten Tapin menjadi 70,00



g. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan koperasi, usaha kecil, dan menengah di Kabupaten Tapin yaitu Persentase Koperasi aktif turun selama tahun 2018-2019, ditambah lagi dengan adanya Covid-19 yang berdampak besar bagi kegiatan ekonomi masyarakat terutama UMKM.

Banyaknya usaha kecil dan menengah masyarakat menjadi terganggu karena pandemi Covid-19 ini, diantaranya pedagang kecil di pasar tradisional yang menjadi sepi dikarenakan masyarakat takut untuk melakukan aktivitas keluar rumah, pengrajin kerajinan yang kehilangan sebagian besar pendapatannya di karenakan pemesanan hasil kerajinan dari pasar yang sangat berkurang, dan sektor UMKM lainnya juga turut terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 ini. Diperlukan kebijakan dan stimulus dari pemerintah daerah untuk mengembalikan kegiatan ekonomi masyarakat sektor usaha kecil dan UMKM agar dapat berlangsung normal

Isu Strategis

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses perencanaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan secara moral dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika birokratis.

Adapun isu-isu strategis yang tersebut dapat dideskripsikan seperti uraian berikut ini.

a. Pertumbuhan ekonomi masih rendah

Dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin tahun 2019 berada pada peringkat ke delapan dengan nilai 4,26 atau bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 5,01 turun sebesar 0,75.

b. Kuantitas dan kualitas infrastruktur masih rendah

Infrastruktur di Kabupaten Tapin masih perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, pada tahun 2019 jalan dalam kondisi mantap sebesar 63,88% dan Jembatan dalam kondisi baik sebesar 55,43%

c. Kualitas Sumber Daya Manusia masih harus ditingkatkan

Dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, indeks pembangunan manusia Kabupaten Tapin tahun 2019 berada pada peringkat keempat dengan nilai 70,13. Harapan lama sekolah Kabupaten Tapin berada pada peringkat 12 dari 13 Kabupaten/Kota dengan nilai 11,86.

d. **Kualitas Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten tapin dari tahun 2017-2019 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 IKLH sebesar 62,98, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 61,47 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 62,06.

1.3. KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Mendasari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin telah melakukan reorganisasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Tapin membentuk lembaga-lembaga pemerintahan dalam bentuk Sekretariat, Badan, Dinas dan Kecamatan, serta unit kerja lainnya sesuai kebutuhan, tugas pokok dan fungsi, berikut organisasi yang telah terbentuk :

No.	Sekretariat/ Badan/ Kecamatan
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
5	Dinas Lingkungan Hidup
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Dinas Ketahanan Pangan
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Dinas Pendidikan
12	Dinas Kesehatan



No.	Sekretariat/ Badan/ Kecamatan
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Dinas Sosial
16	Dinas Tenaga Kerja
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
20	Badan Keuangan dan Aset Daerah
21	Badan Pendapatan Daerah
22	Dinas Pertanian
23	Dinas Perikanan
24	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
25	Dinas Perindustrian
26	Dinas Perdagangan
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
29	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
31	RSUD Datu Sanggul Rantau
32	Kecamatan Tapin Utara
33	Kecamatan Tapin Selatan
34	Kecamatan Lokpaikat
35	Kecamatan Bungur
36	Kecamatan Tapin Tengah
37	Kecamatan Salam Babaris
38	Kecamatan Bakarangan
39	Kecamatan Piani
40	Kecamatan Binuang
41	Kecamatan Hatungun
42	Kecamatan Candi Laras Selatan
43	Kecamatan Candi Laras Utara

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan akuntabilitas kinerja ini selain berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja ini ditekankan pada aspek capaian dari program, sasaran dan kegiatan. Disamping itu juga penyusunannya menyelaraskan dengan substansi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistematika Penyusunan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan



Dalam bab ini disajikan penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan laporan kinerja dan kelembagaan perangkat daerah.

BAB II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menyajikan secara ringkas visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

BAB IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2.2.1. Visi

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud

Suatu pernyataan visi dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, lugas, dan jelas serta memenuhi kriteria atau karakteristik visi sebagaimana telah dijelaskan di awal. Suatu pernyataan visi dapat berupa satu atau lebih pernyataan atau kalimat yang merangkum atau menggabungkan berbagai pokok visi terpilih. Dengan kesederhanaan kalimat, diupayakan visi merupakan satu kalimat dengan pokok-pokok visi dapat lebih dari satu.

Kata kunci untuk perumusan pernyataan visi dan misi Kabupaten Tapin secara ilmiah dengan berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan pada RPJPD. Hal lain yang tidak kalah penting diperhatikan dalam merumuskan pernyataan visi yaitu isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun perumusan visi Kabupaten Tapin disajikan pada tabel dibawah ini.



Tabel 1. Perumusan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin 2018-2023

VISI RPJMD PROVINSI KALSEL 2006-2021	VISI RPJPD KABUPATEN TAPIN 2005-2023	ISU STRATEGIS KABUPATEN TAPIN 2018-2023	POKOK-POKOK VISI	PERNYATAAN VISI
Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera , Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing	<p>Tapin Yang Religius dan Sejahtera</p> <p>Ada dua kata kunci dalam visi pembangunan Kabupaten Tapin 2005-2025: "Kabupaten Tapin yang Religius" mengandung makna bahwa visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat akan arah dan tujuan kehidupan yang makmur secara lahir dan bathin. "Sejahtera" mengandung makna bahwa suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat 2) Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya. 3) Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing. 4) Pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian dan pariwisata secara optimal dan lestari untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 5) Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan penyandang kesejahteraan sosial. 6) Peningkatan pelayanan infrastruktur yang merata dan berkeadilan. 7) Pengelolaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. 8) Peningkatan tata kelola 	<ul style="list-style-type: none"> • Maju • Sejahtera • Agamis 	BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS



VISI RPJMD PROVINSI KALSEL 2006-2021	VISI RPJPD KABUPATEN TAPIN 2005-2023	ISU STRATEGIS KABUPATEN TAPIN 2018-2023	POKOK-POKOK VISI	PERNYATAAN VISI
	ketentraman yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.	pemerintahan dan pelayanan publik yang prima.		

Dengan penjelasan di atas, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, adalah:

“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”

Penjelasan visi dibuat untuk menjelaskan masing-masing pokok visi. Dengan demikian, penjelasan visi pada dasarnya menguraikan kembali pokok-pokok visi yang telah disepakati ke dalam perwujudan visi dengan merinci lebih baik berbagai atribut atau penjelasan masing-masing pokok visi.

Tabel 2. Penyusunan Penjelasan Visi

Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	• Bersama	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.
	• Mewujudkan	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
	• Maju	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
	• Sejahtera	Mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
	• Agamis	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.



2.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Perumusan misi harus mampu menerjemahkan visi kedalam bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut.

Tabel 3. Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin 2018-2023

Pernyataan Visi	Kata Kunci Visi	Misi
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	MAJU	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing
		2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa
	SEJAHTERA	3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan
		4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat
	AGAMIS	5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>)

Berdasarkan proses perumsuan misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.**
- 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.**
- 3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.**



4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

Penjelasan masing-masing misi diperlukan untuk lebih memberi gambaran yang jelas mengenai makna yang dimiliki setiap misi. Berikut ini disajikan penjelasan dari 5 (lima) misi Kabupaten Tapin 2018-2023:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.

- a. **Agamis** bermakna segala perilaku masyarakat bernafaskan keagamaan, tidak hanya pada penghayatan dan pengamalan ajaran agama tetapi juga perwujudan dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. **Sehat** bermakna masyarakat yang sehat secara fisik yang ditunjukkan dengan meningkatnya usia harapan hidup.
- c. **Cerdas** bermakna meningkatnya kemampuan berfikir dan bertindak masyarakat yang berlandaskan kemampuan intelektual, kemampuan emosional dan kemampuan spiritual.
- d. **Berbudaya** bermakna perilaku masyarakat yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku di masyarakat, sesuai dengan perintah di setiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum Negara yang berlaku.
- e. **Berdaya saing** bermakna meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memproduksi dibandingkan dengan modal yang digunakan. Masyarakat memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.

- a. **Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas** adalah pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan gini ratio.
- b. **Agrobisnis** merupakan upaya memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Terkandung semangat untuk mempertahankan



predikat sebagai lumbung padi Provinsi Kalimantan Selatan dan penyangga pangan nasional.

- c. **Pariwisata** merupakan salah satu sektor yang diunggulkan sebagai pengungkit perekonomian di Tapin untuk masa yang akan datang.
- d. **Desa** merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Pembangunan diarahkan untuk mendorong pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.

- a. **Infrastruktur** meliputi transportasi, irigasi, air bersih, persampahan, limbah, bangunan, energi. Pengelolaan infrastruktur secara berkelanjutan meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mewujudkan rencana struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin.
- b. **Pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan** berarti memanfaatkan dan memelihara lingkungan secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin.

4. Mengembangkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Iklim investasi yang kondusif dicapai dengan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga, birokrasi yang berorientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta dukungan infrastruktur. Dengan iklim yang kondusif maka akan meningkatkan penanaman modal yang memadai pada calon lokasi investasi yang ada dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

Bermakna peningkatan sikap mental Aparatur Sipil Negara yang berorientasi kepada hasil (outcome) dan pelayanan kepada masyarakat serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten tapin Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing

Tujuan 1.1 : Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Kabupaten Tapin.

- Sasaran :**
- Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan
 - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - Meningkatnya daya beli masyarakat
 - Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan
 - Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-1 yang disajikan sebagai berikut:

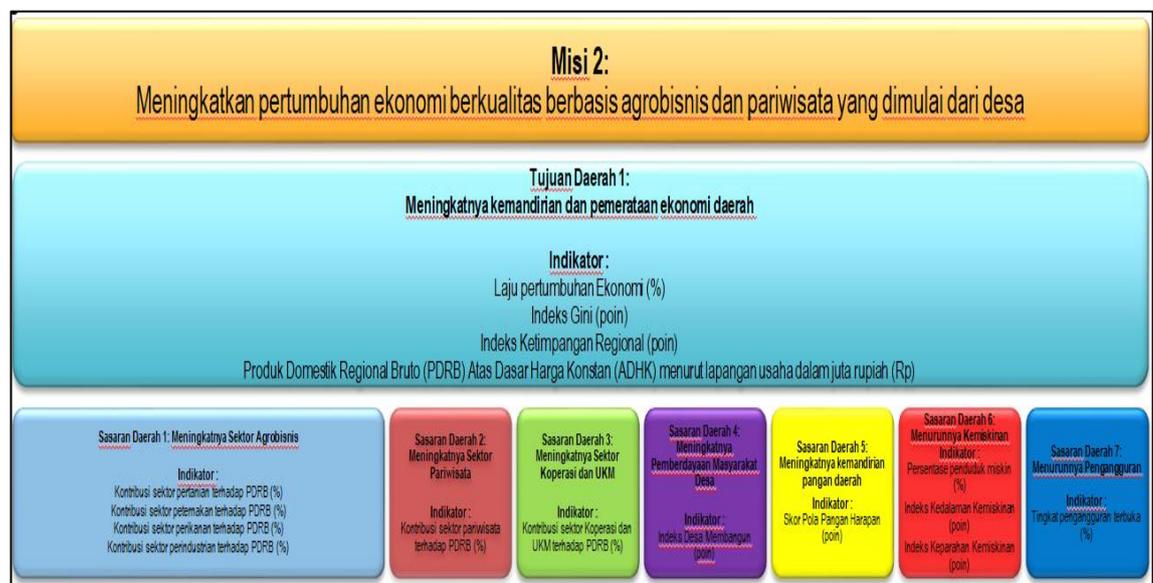


Misi 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata yang Dimulai dari Desa.

Tujuan 2.1 : Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah.

- Sasaran** :
- Meningkatnya Sektor Agrobisnis
 - Meningkatnya Sektor Pariwisata
 - Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM
 - Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Meningkatnya kemandirian pangan daerah
 - Menurunnya kemiskinan
 - Menurunnya Pengangguran

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-2 yang disajikan sebagai berikut:



Misi 3 : **Memantapkan Pengelolaan Infrastruktur Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan**

Tujuan 3.1 : Meningkatkan kualitas infrastruktur.

- Sasaran** :
- Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
 - Meningkatnya kualitas jaringan air bersih
 - Meningkatnya kualitas jaringan irigasi
 - Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan public
 - Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi

Tujuan 3.2 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

- Sasaran** :
- a. Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
 - b. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-3 yang disajikan sebagai berikut:



Misi 4 : **Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Demi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Tujuan 4.1 : Meningkatnya investasi.

Sasaran : Meningkatkan keamanan daerah

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-4 yang disajikan sebagai berikut:



Misi 5 : **Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (Good and Clean Government)**

- Tujuan 5.1** : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat.
- Sasaran** : a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
b. Meningkatnya kualitas ASN
c. Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5 yang disajikan sebagai berikut:



Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi kedalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah.

2.3. PERENCANAAN KINERJA

Sasaran dan indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2021. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan dan disertai rencana tingkat capaiannya (target). Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ada dalam Rencana Strategis.

Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021 adalah:

Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	
VISI: BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS				
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing				
Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin	Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan	1	Rata-rata lama sekolah (poin)	8.72
		2	Harapan lama sekolah (poin)	13.34
		3	Rasio budaya baca (poin)	0.002679
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4	Angka Harapan Hidup (poin)	71.83
	Meningkatnya daya beli Masyarakat	5	Pengeluaran per kapita (Rp)	1.274.615
	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	6	Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang diselesaikan (%)	85
	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	7	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	84.92
		8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	73.32
Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa				
Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	9	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	23.53
		10	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	2.7
		11	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1.6
		12	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	7.6
	Meningkatnya Sektor Pariwisata	13	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	3.5
	Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM	14	Kontribusi sektor Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	1.5
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	15	Indeks Desa Membangun (poin)	0.58
	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	16	Skor Pola Pangan Harapan (poin)	87
	Menurunnya Kemiskinan	17	Persentase penduduk miskin (%)	3.55
		18	Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin)	0.44
		19	Indeks Keparahan Kemiskinan (poin)	0.05
	Menurunnya Pengangguran	20	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3.6
	Misi 3: Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan			
	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	21	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	66



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	
VISI: BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS				
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing				
Meningkatkan kualitas infrastruktur		22	Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	58
	Meningkatnya kualitas jaringan air bersih	23	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih (%)	60
	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	24	Luas areal sawah yang terairi (%)	71
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	25	Persentase bangunan gedung negara (gedung kantor dan gedung pelayanan publik) dalam kondisi baik (%)	48
	Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi	26	Persentase desa yang tersambung dengan jaringan komunikasi (%)	94
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	54.829
		28	Tingkat ketaatan terhadap RTRW (%)	63
	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	29	Persentase rumah layak huni (%)	97.98
Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat				
Meningkatnya investasi	Meningkatnya keamanan daerah	30	Indeks rasa aman (poin)	0.51
Misi 5: Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)				
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	31	Nilai SAKIP (predikat)	B
		32	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (predikat)	WTP
	Meningkatnya kualitas ASN	33	Indeks Profesionalitas ASN (poin)	99
	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	34	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	81

2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Tapin yang diperjanjikan Tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 5. Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	
Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin	Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan	1 Rata-rata lama sekolah (poin)	8.72	
		2 Harapan lama sekolah (poin)	13,34	
		3 Rasio budaya baca (poin)	0.002679	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Angka Harapan Hidup (poin)	71.83	
	Meningkatnya daya beli Masyarakat	1 Pengeluaran per kapita (Rp dalam ribu)	1.274.615	
	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	1 Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang diselesaikan (%)	85	
	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	84.92	
		2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	73.32	
	Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	1 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	23.53
			2 Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	2.7
3 Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)			1.6	
4 Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)			7.6	
Meningkatnya Sektor Pariwisata		1 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	3.5	
Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM		1 Kontribusi sektor Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	1.5	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa		1 Indeks Desa Membangun (poin)	0.58	
Meningkatnya kemandirian pangan daerah		1 Skor Pola Pangan Harapan (poin)	87	
Menurunnya Kemiskinan		1 Persentase penduduk miskin (%)	3.55	
		2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin)	0.44	



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN
		3 Indeks Keparahan Kemiskinan (poin)	0.05
	Menurunnya Pengangguran	1 Tingkat pengangguran terbuka (%)	3.6
Meningkatkan kualitas infrastruktur	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	1 Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	66
		2 Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	58
	Meningkatnya kualitas jaringan air bersih	1 Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih (%)	60
	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	1 Luas areal sawah yang terairi (%)	71
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	1 Persentase bangunan gedung negara (gedung kantor dan gedung pelayanan publik) dalam kondisi baik (%)	48
	Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi	1 Persentase desa yang tersambung dengan jaringan komunikasi (%)	94
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)
2 Tingkat ketaatan terhadap RTRW (%)			63
Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan		1 Persentase rumah layak huni (%)	97.98
Meningkatnya investasi	Meningkatnya keamanan daerah	1 Indeks rasa aman (poin)	0.51
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1 Nilai SAKIP (predikat)	B
		2 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (predikat)	WTP
	Meningkatnya kualitas ASN	1 Indeks Profesionalitas ASN (poin)	99
	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	81

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapin tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam sebuah Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan tersebut harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk sebuah pertanggungjawaban publik.

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara realisasi tahun berjalan versus realisasi n-1, realisasi tahun berjalan versus target pada RPJMD, persentase capaian versus standar yang berlaku, termasuk dengan standar nasional yang terkait. Hasil pengukuran kinerja disajikan menurut kelompok Kinerja Utama yang bersifat makro dan capaian sasaran organisasi secara keseluruhan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi:

1. Indikator bermakna positif, artinya :jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakinburuk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya,maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

- Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome)

- Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan Target Kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis capaian kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis

3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kinerja perekonomian Kabupaten Tapin mengalami kenaikan pada tahun 2016-2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2017-2020. Hal tersebut, terlihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin tahun 2016 sebesar 4,97%, tahun 2017 sebesar 5,14%, tahun 2018 sebesar 5,01%, tahun 2019 sebesar 4,25% dan tahun 2020 sebesar -1,5%, atau turun sebesar 5,75%. Tahun 2020 bila dibandingkan angka tersebut masih diatas laju pertumbuhan ekonomi provinsi yang mencapai -1,81%, Kabupaten Tapin berada diperingkat ke enam dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan.

A. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan tahun dasar 2010 pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan akan tetapi pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.358.877,8 juta atau terjadi penurunan sebesar 9,28% dibanding tahun 2019. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tapin periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.11. sebagai berikut:

**Tabel 6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapin
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016 – 2020
(Juta rupiah)**

Lapangan Usaha	2016 (Juta Rupiah)	2017 (Juta Rupiah)	2018 (Juta Rupiah)	2019* (Juta Rupiah)	2020** (Juta Rupiah)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5608974.37	5897160.64	6192446.99	6455626.05	6358877.79
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS	5608974.37	5897160.64	6192446.99	6455626.05	6358877.79

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

Catatan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sementara itu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan akan tetapi tahun 2020 adalah sebesar Rp. 8.395.704,5 atau terjadi penurunan bila dibanding tahun 2019, pada tahun 2019 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 8.437.285,4. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tapin periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapin
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020**

Lapangan Usaha	2016 (Juta Rupiah)	2017 (Juta Rupiah)	2018 (Juta Rupiah)	2019 * (Juta Rupiah)	2020** (Juta Rupiah)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6897021.12	7430807.64	7999159.37	8437285.42	8395704.53
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS	6897021.12	7430807.64	7999159.37	8437285.42	8395704.53

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

Catatan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

B. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan gambaran tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah secara kasar. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama lima tahun mengalami fluktuatif, tahun 2016 sebesar Rp 39,81 juta, pada tahun 2017 sebesar Rp 37,42 Juta, Rp. 42,31 juta pada tahun 2018 menjadi Rp. 44,09 juta pada tahun 2019 dan pada tahun

2020 menjadi Rp. 43,36 juta. Sementara itu untuk perkembangan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari PDRB Per kapita atas dasar harga konstan mengalami kenaikan pada tahun 2016-2019 dan turun pada tahun 2020 dengan rincian yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp 30,43 juta, pada tahun 2017 sebesar Rp 31,59 juta, pada tahun 2018 sebesar Rp. 32,75 juta Rp. 33,73 juta pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 32,84 juta.

Tabel 8 PDRB Perkapita ADHB dan PDRB Perkapita ADHK tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB Perkapita ADHB	PDRB Perkapita ADHK
1	2016	39,81	30,43
2	2017	37,42	31,59
3	2018	42,31	32,75
4	2019*)	44,09	33,73
5	2020**)	43,36	32,84

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021, (diolah)

Catatan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

C. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi mengenai dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Dinamika angka tingkat inflasi memiliki pengaruh besar terhadap beberapa variable penting lainnya. Perkembangan harga barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat.

Di Indonesia terdapat 44 kota yang dihitung tingkat inflasinya dan kota Banjarmasin adalah satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang termasuk dalam penghitungan resmi secara nasional. Dengan asumsi bahwa pergerakan harga di Kabupaten Tapin tidak terlalu jauh berbeda dengan tingkat harga di kota Banjarmasin, maka tingkat inflasi kota Banjarmasin dijadikan acuan dan dianggap sebagai tingkat inflasi di Kabupaten Tapin.

Kabupaten Tapin memakai data inflasi Kota Banjarmasin. Tingkat inflasi Kota Banjarmasin Tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif berada pada tahun 2016 sebesar 3.68%, tahun 2017 sebesar 3.82%,

tahun 2018 sebesar 2,63%, tahun 2019 sebesar 4,15% dan tahun 2020 sebesar 1,67%. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, rata-rata pertumbuhan inflasi kota Banjarmasin sebesar 3,19%, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.14 berikut :

Tabel 9 Nilai Inflasi Kabupaten Tapin dan Nasional Tahun 2016-2020

Tahun	Tingkat Inflasi (%)	
	Kota Banjarmasin	Nasional
2016	3,68	3,02
2017	3,82	3,61
2018	2,63	3,13
2019	4,15	2,72
2020	1,67	1,68
Rata-rata	3,19	2,83

Sumber : 1. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

1. Badan Pusat Statistik RI tahun,2021

D. Indeks Gini/Koefisien Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Pengelompokan nilai Koefisien Gini adalah:

- $G < 0,3$ = ketimpangan rendah
- $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang
- $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi

Dalam menghitung nilai koefisien gini, maka dibutuhkan data-data seperti Jumlah rumah tangga atau penduduk dan rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumahtangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya. Perbandingan Koefisien Gini Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional pada tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 10 Koefisien Gini Kabupaten Tapin
Tahun 2016-2020**

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Tapin	0,32	0,33	0,28	0,268	0,274
Provinsi Kalimantan Selatan	0,332	0,347	0,344	0,330	0,332
Nasional	0,397	0,393	0,389	0,380	0,381

Sumber : 1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021
2. Badan Pusat Statistik RI, 2021

E. Persentase Penduduk Miskin

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Pada tahun 2016-2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapin mengalami kenaikan dan pada tahun 2017-2020 mengalami penurunan, baik dalam hal jumlah maupun persentase, dimana jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapin pada tahun 2016 sebanyak 6.810 jiwa atau 3,70%, tahun 2017 sebanyak 7.011 jiwa atau 3,77%, tahun 2018 sebanyak 6.979 jiwa atau 3,70%, tahun 2019 sebanyak 6.507 jiwa atau 3,41% dan pada tahun 2020 sebanyak 5.899 jiwa atau 3,06%.

Tabel 11. Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020

variabel kemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan	369.153	390.488	405.591	406.367	446.577
Jumlah Penduduk Miskin	6.810	7.011	6.979	6.507	5.899
Persentase Penduduk Miskin (P0)	3,7	3,77	3,7	3,41	3,06
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,25	0,4	0,35	0,46	0,45
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	0,03	0,08	0,06	0,09	0,12

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kesejahteraan masyarakat bergantung pada status ekonomi masyarakat. Besarnya beban ekonomi dan kecilnya pendapatan yang diperoleh sebagian kecil kalangan belum mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang baik. Salah satu beban tersebut adalah tingginya angka ketergantungan penduduk dalam masyarakat. Pada sisi lain juga terjadi efek terhadap masyarakat dalam bentuk keterbatasan kemampuan sosial dalam masyarakat. Bentuk keterbatasan ini akan muncul dalam bentuk masalah kesejahteraan sosial seperti balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga rentan sosial, komunitas adat terpencil dan lain sebagainya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapin berbagai upaya telah dilakukan yaitu dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan pada akhir-akhir ini sudah mengalami peningkatan, hal ini tercermin pada turunnya angka penduduk miskin, dengan melakukan upaya/program bersifat proyek padat karya, penyediaan modal usaha mikro, pelayanan kesejahteraan sosial.

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indeks komposit untuk mengukur pencapaian upaya pembangunan manusia dari berbagai perspektif, yaitu kesehatan, pendidikan dan pengeluaran.

IPM Kabupaten Tapin tahun 2016-2019 mengalami kenaikan akan tetapi tahun 2020 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019, yang semula 70,13 turun menjadi 70,11. Angka IPM tersebut masih rendah bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 70,91 maupun IPM Nasional 71,94. Indeks

Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin berada pada urutan ke lima dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan.

Data IPM Kabupaten Tapin bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan maupun Nasional Tahun 2016 sampai 2020 akan nampak sebagai berikut :

Tabel 12. Data IPM Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020

Kabupaten/Provinsi/Nasional	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Tapin	68,05	68,70	69,53	70,13	70,11
Provinsi Kalimantan Selatan	69,05	69,65	70,17	70,72	70,91
Nasional	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber : 1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021
2. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021
3. Badan Pusat Statistik RI, 2021

B. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator baru yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru menggantikan indikator Angka Melek Huruf yang digunakan pada metode lama. Penggunaan HLS dalam perhitungan indeks pendidikan, menjadikan IPM dengan metode baru mampu memotret gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi dibanding IPM dengan metode lama.

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tapin dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 13. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Di Kabupaten Tapin dan Prov. Kalsel Tahun 2016-2020

Kabupaten/Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Tapin	11,24	11,52	11,85	11,86	11,94
Provinsi Kalimantan Selatan	12,29	12,46	12,50	12,52	12,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020 cenderung meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data harapan lama sekolah, Kabupaten Tapin berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2016-2020 dan pada tahun 2020 berada di urutan ke-12 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Tapin.

C. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 5 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Sesuai standar global (UNDP) nilai maksimum Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah 15 tahun atau setingkat Diploma III.

Untuk menghitung angka rata-rata lama sekolah maka digunakan data jumlah tahun bersekolah individu usia 5 tahun ke atas dan juga data jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas. Berikut adalah hasil olah kedua data tersebut sehingga menjadi angka rata-rata lama sekolah.

Tabel 14. Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020

Kabupaten/Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Tapin	7,44	7,53	7,54	7,75	7,76
Provinsi Kalimantan Selatan	7,89	7,99	8	8,20	8,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020 cenderung meningkat. Pada Tahun 2020 Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Tapin adalah 7,76 tahun artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Tapin bersekolah sampai 7 tahun 6 bulan atau setingkat Kelas 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Sementara itu angka rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Tapin selama periode tahun 2016-2020. Data tahun 2020 angka rata-

rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 8,29 tahun sedangkan Kabupaten Tapin sebesar 7,76 tahun . Pada tahun 2020 berada di urutan ke lima dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data angka rata-rata lama sekolah tahun 2016-2020, maka rata-rata lama sekolah harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Tapin agar bisa lebih ditingkatkan.

D. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Tabel 15. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2020

Tingkat Pendidikan	2019	2020
Kabupaten Tapin :		
SD/MI (%)	99,41	98,98
SLTP/MTs (%)	72,31	72,20
SLTA/MA/SMK (%)	54,45	54,79
Kalimantan Selatan :		
SD/MI (%)	98,81	98,76
SLTP/MTs (%)	74,84	75,51
SLTA/MA/SMK (%)	57,82	58,25

Sumber: 1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

2. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa APM di Kabupaten Tapin Tahun 2019-2020 cenderung berfluktuasi untuk seluruh jenjang pendidikan. APM tertinggi terdapat pada jenjang SD/MI dan APM terendah pada jenjang SLTA/MA/SMK. Hal ini menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah siswa yang masih sekolah pada usia yang sesuai dengan jenjang pendidikannya.

APM Provinsi Kalimantan Selatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan APM Kabupaten Tapin untuk jenjang pendidikan SLTP/MTs dan SLTA/MA/SMK selama periode tahun 2019-2020. APM

Kabupaten Tapin lebih tinggi dari APM Provinsi Kalimantan Selatan untuk jenjang pendidikan SD/MI.

E. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 16 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2020

Tingkat Pendidikan	2019	2020
Kabupaten Tapin :		
SD/MI (%)	114,57	112,66
SLTP/MTs (%)	85,85	86,23
SLTA/MA/SMK (%)	63,54	65,08
Kalimantan Selatan :		
SD/MI (%)	108,69	107,28
SLTP/MTs (%)	83,83	86,31
SLTA/MA/SMK (%)	78,86	79,10

Sumber: 1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

2. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa APK di Kabupaten Tapin Tahun 2019-2020 cenderung menurun pada jenjang SD/MI. Namun untuk jenjang SLTP/MTs dan jenjang SLTA/MA/SMK cenderung meningkat di tahun 2020.

APK Provinsi Kalimantan Selatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan APK Kabupaten Tapin khususnya jenjang pendidikan SLTP/MTs dan SLTA/MA/SMK selama periode tahun 2019-

2020. APK Kabupaten Tapin lebih tinggi dari APK Provinsi Kalimantan Selatan untuk jenjang pendidikan SD/MI untuk tahun 2019-2020.

F. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi (AKB)).

**Tabel 17. Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Kabupaten Tapin Tahun 2018-2020**

Indikator	2018	2019	2020
AKB	28	27	14
AKHB	972	973	986

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, 2019-2021

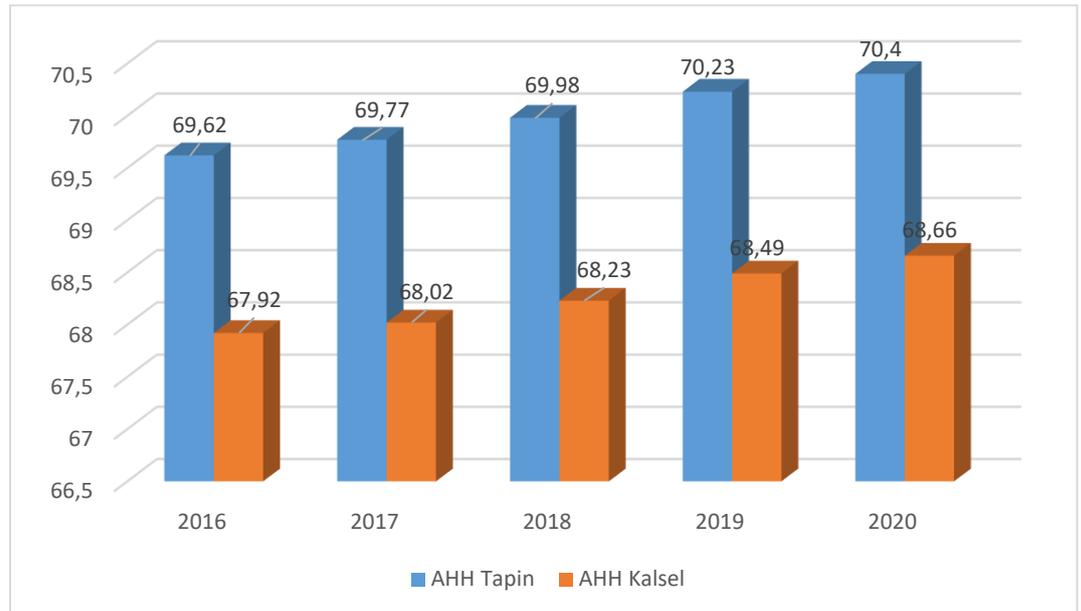
G. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

AHH pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.



Grafik 2. 1
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

AHH Kabupaten Tapin selama periode tahun 2016-2020 lebih tinggi dibandingkan dengan AHH Provinsi Kalimantan Selatan. Data terakhir tahun 2020 AHH Kabupaten Tapin sebesar 70,40 tahun, sedangkan AHH Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 68,66 tahun.

H. Prevalensi Stunting

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. Prevalensi Stunting menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan diadakan per 5 tahun sekali.

Tabel 18. Prevalensi Stunting Di Kabupaten Tapin Menurut Riskesdas Kementerian Kesehatan

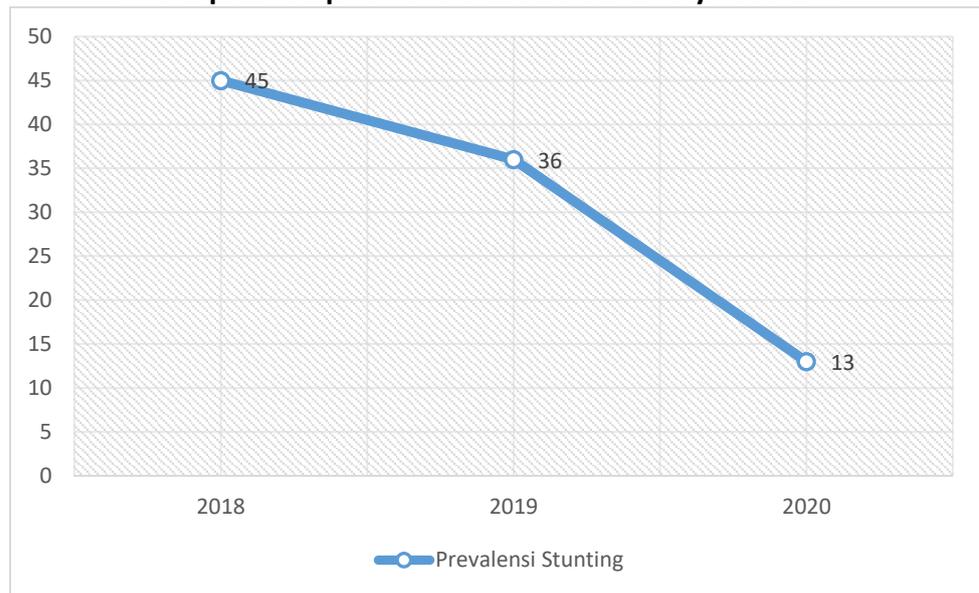
Uraian	2013	2018
Prevalensi Stunting	45,3 %	36,04 %

Sumber: Riskesdas, Kementerian Kesehatan, 2018

Prevalensi Stunting di Kabupaten Tapin menurun secara Signifikan dari tahun 2018 sebesar 36,04%, pada tahun 2019 sebesar

16,85% dan pada tahun 2020 sebesar 13,73% dari data tersebut berarti penanganan stunting di Kabupaten Tapin semakin baik.

Gafik 2.2
Prevalensi Stunting
di Kabupaten Tapin Menurut data hasil entry E-PPBGM



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 2018,2019 dan 2020

I. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja diartikan sebagai peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing.

Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif atau disebut juga sumber daya manusia.

**Tabel 19. Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja
Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2020**

Uraian	2018*	2019*	2020
Penduduk yang bekerja	93.739	94.660	96.936
Angkatan Kerja	97.670	98.246	100.696
Rasio	95,98	96,35	96,27

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2018-2020

3.1.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021

Dari hasil capaian pengukuran secara mandiri (self assessment) terhadap 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tapin pada tahun 2021, Indikator Kinerja Utama yang pencapaian kinerjanya >100% sebanyak 14 (empat belas).

Hasil capaian pengukuran terhadap 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tapin pada tahun 2021 ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Capaian IKU Pemerintah Kabupaten Tapin 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Capaian Kinerja tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	a. Rata-Rata Lama Sekolah (poin)	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$ <p>dengan: P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas Lama sekolah penduduk ke-i = a. Tidak pernah sekolah = 0 b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 d. Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</p> <p>Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Tapin, data BPS (tapinkab.bps.go.id)</p>	93,49	89,11
		b. Harapan Lama Sekolah (poin)	<p>Formula → $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$</p> <p>Keterangan: HLS_a^t Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t Jumlah penduduk usia i pada tahun t i Usia (a, a + 1, ..., n) FK Faktor koreksi pesantren</p> <p>Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Tapin, data BPS (tapinkab.bps.go.id)</p>	94,02	89,58
		c. Rasio Budaya Baca	Pemustaka (pengunjung perpustakaan)/jumlah penduduk Sumber data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tapin	89,41	241,92

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Capaian Kinerja tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (poin)	$\frac{\text{Jumlah umur yang meninggal dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah orang yang meninggal dalam 1 tahun}} = \text{AHH}$ <p>Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Tapin, DPPKB Kab. Tapin dan RSUD Datu Sanggul</p>	98,99	98,20
3	Meningkatnya daya beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp dalam ribu)	<p>Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga</p> <p>Rumus :</p> $Y^{**} = \frac{Y^*}{PPP} \qquad Y^* = \frac{Y}{IHK} \times 100$ <p>dimana:</p> <p>Y** = Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Y* = Pengeluaran per kapita harga konstan Y = Pengeluaran per kapita setahun IHK = Indeks Harga Konsumen tahun dasar 2012</p> <p>Sumber Data: Bag. Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Tapin, data BPS (tapinkab.bps.go.id)</p>	97,76	93,77
4	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang diselesaikan (%)	$\frac{\text{Jumlah Konflik Sosial Yang Dapat Diatasi}}{\text{Jumlah Konflik Sosial}} \times 100$ <p>Sumber Data: Bag. Kesejahteraan Masyarakat Setda Kab. Tapin, Badan Kesbangpol Kab. Tapin</p>	125	117,65

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Capaian Kinerja tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021
5	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	$\frac{\text{Meningkatnya Kualitas Perempuan yang bekerja}}{\sum \text{Tenaga kerja perempuan}} \times 100$ $\frac{\text{-----}}{\sum \text{Jumlah tenaga laki laki}}$ <p><i>Sumber Data: Dinas PPPA Kab. Tapin, data BPS (tapinkab.bps.go.id)</i></p>	99,24	99,09
		b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	$\frac{1}{3} (\text{Ipar} + \text{IDM} + \text{linc-dist})$ <p>Ipar IDM linc-dis = Indeks Keterwakilan di parlemen = Indeks pengambilan keputusan = Indeks distribusi pendapatan</p> <p><i>Sumber Data: Dinas PPPA Kab. Tapin, data BPS (tapinkab.bps.go.id)</i></p>	88,70	88,61
6	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	a. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	$\frac{((\text{Jumlah PDRB Sektor Pertanian tahun ke } - n) - (\text{Jumlah PDRB sektor Pertanian tahun ke } n-1))}{(\text{Jumlah PDRB sektor Pertanian tahun ke } n-1)} \times 100$ <p><i>Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Tapin, data BPS (tapinkab.bps.go.id)</i></p>	91,66	65,45
		b. Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	$\frac{((\text{Jumlah PDRB Sektor Peternakan tahun ke } - n) - (\text{Jumlah PDRB sektor Peternakan tahun ke } n-1))}{(\text{Jumlah PDRB sektor Peternakan tahun ke } n-1)} \times 100$ <p><i>Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Tapin, data BPS (tapinkab.bps.go.id)</i></p>	57,31	55,56

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Capaian Kinerja tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021
		c. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	$\frac{((\text{Jumlah PDRB Sektor Perikanan tahun ke } - n) - (\text{Jumlah PDRB sektor Perikanan tahun ke } n-1))}{(\text{Jumlah PDRB sektor Perikanan tahun ke } n-1)} \times 100$ <p><i>Sumber Data: Dinas Perikanan Kab. Tapin, data BPS (tapinkab.bps.go.id)</i></p>	127,33	112,50
		d. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	$\frac{((\text{Jumlah PDRB Sektor Perindustrian tahun ke } - n) - (\text{Jumlah PDRB sektor Perindustrian tahun ke } n-1))}{(\text{Jumlah PDRB sektor Perindustrian tahun ke } n-1)} \times 100$ <p><i>Sumber Data: Dinas Perindustrian Kab. Tapin, data BPS (tapinkab.bps.go.id)</i></p>	90,41	89,74
7	Meningkatnya Sektor Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	$\frac{((\text{Jumlah PDRB Sektor Pariwisata tahun ke } - n) - (\text{Jumlah PDRB sektor Pariwisata tahun ke } n-1))}{(\text{Jumlah PDRB sektor Pariwisata tahun ke } n-1)} \times 100$ <p><i>Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin, data BPS (tapinkab.bps.go.id)</i></p>	180	70,29
8	Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM	Kontribusi sektor Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	$\frac{((\text{Jumlah PDRB Sektor Koperasi dan UKM tahun ke } - n) - (\text{Jumlah PDRB sektor Koperasi dan UKM tahun ke } n-1))}{(\text{Jumlah PDRB sektor Koperasi dan UKM tahun ke } n-1)} \times 100$ <p><i>Sumber Data: Dinas Perindustrian Kab. Tapin, data BPS (tapinkab.bps.go.id)</i></p>	92,86	84,67

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Capaian Kinerja tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021
9	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun (poin)	<p>IDM merupakan indeks komposit yang dihasilkan dari rata rata indeks ketahanan ekologi (IKL), indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan sosial (IKS) setiap desa.</p> <p>Formulasi Indeks Desa Membangun (IDM) :</p> $IDM = \frac{1}{3} (IKL + IKE + IKS)$ <p>Keterangan :</p> <p>IDM = Indeks Desa Membangun IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi) IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi IKS = Indeks Ketahanan Sosial</p> <p>Setiap dimensi dibangun dari serangkaian variabel, dan setiap variabel diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator memiliki skor 0 s.d. 5, semakin tinggi skor semakin memiliki makna yang positif. Total Skor Indikator ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 0 - 1.</p> $Y = \frac{Total\ Skor\ X}{Nilai\ Maksimum\ (X)}$ <p>Y = Komponen indeks yang terdiri dari : Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) X = Indikator (X)</p> <p>Sumber Data: Dinas PMD Kab. Tapin, Dinas PPKB Kab. Tapin, Dinas PUPR Kab. Tapin</p>	114,04	117,24

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Capaian Kinerja tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021
10	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (poin)	<p>Menghitung Total Skor Pola Pangan Harapan. Total skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dikenal dengan kualitas konsumsi pangan adalah jumlah dari skor 9 kelompok pangan, yaitu jumlah dari kelompok padi-padian sampai dengan skor kelompok lain-lain. Angka ini disebut skor PPH konsumsi pangan, yang menunjukkan tingkat keragaman konsumsi pangan.</p> <p>Skor PPH = (skor PPH kelompok padi-padian + umbi-umbian ++ skor PPH kelompok lain - lain</p> <p><i>Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapin</i></p>	98,26	101,61
11	Menurunnya Kemiskinan	a. Persentase penduduk miskin (%)	<p>Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Rumus :</p> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana : $\alpha = 0$ z =garis kemiskinan. yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3,, q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk</p> <p><i>Sumber Data: Dinas Sosial Kab. Tapin, Dinas Perkimtan Kab. Tapin</i></p>	119,28	101,41

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Capaian Kinerja tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021
		b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (<i>Poverty Gap Index-P1</i>), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. <i>Sumber Data: Dinas Sosial Kab. Tapin, Dinas Perkimtan Kab. Tapin</i>	95,56	63,64
		c. Indeks Keparahan Kemiskinan (poin)	Indeks Keparahan Kemiskinan (<i>Poverty Severity Index/P2</i>) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin <i>Sumber Data: Dinas Sosial Kab. Tapin, Dinas Perkimtan Kab. Tapin</i>	50,00	80,00
12	Menurunnya Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka(%)	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$ <i>Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin, Seluruh Kecamatan di Kab. Tapin</i>	101,88	137,78
13	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	a. Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi mantap dan berkeselamatan}}{\text{total Panjang jalan}} \times 100\%$ <i>Sumber Data: Dinas PUPR Kab. Tapin</i>	128,21	106,24
		b. Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	$\frac{\text{Panjang Jembatan kondisi mantap}}{\text{Total jembatan}} \times 100\%$ <i>Sumber Data: Dinas PUPR Kab. Tapin</i>	124,73	75,86

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Capaian Kinerja tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021
14	Meningkatnya kualitas jaringan air bersih	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih (%)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk berakses air bersih}}{\text{Jumlah total penduduk}} \times 100$ <p><i>Sumber Data: Dinas PUPR Kab. Tapin</i></p>	108,33	113,52
15	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Luas areal sawah yang terairi (%)	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik fungsional}}{\text{Total panjang saluran irigasi}} \times 100$ <p><i>Sumber Data: Dinas PUPR Kab. Tapin</i></p>	52,90	24,06
16	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan public	Persentase bangunan gedung negara (gedung kantor dan gedung pelayanan publik) dalam kondisi baik (%)	$\frac{\text{Jumlah gedung/kantor pelayanan publik dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah gedung/kantor layanan publik}} \times 100$ <p><i>Sumber Data: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tapin, Dinas Perhubungan kab. Tapin, Dinas PUPR Kab. Tapin</i></p>	110,39	182,40
17	Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi	Persentase desa yang tersambung dengan jaringan komunikasi (%)	$\frac{\text{Jumlah Desa yang tersambungan jaringan komunikasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$ <p><i>Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapin</i></p>	103,26	101,31

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Capaian Kinerja tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021
18	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	<p>Rumus : $IKLH = \frac{(IKA+IKU+IKb+IKk)}{4}$</p> <p>IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKb = Indeks Kebisingan IKk = Indeks Kehijauan</p> <p>Sumber Data: Dinas LH Kab. Tapin, Dinas PUPR Kab. Tapin</p>	129,41	115,96
		b. Tingkat ketaatan terhadap RTRW (%)	<p>$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan sesuai RTRW}} \times 100$</p> <p>Sumber Data: Dinas LH Kab. Tapin, Dinas PUPR Kab. Tapin</p>	114,04	126,98
19	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Persentase rumah layak huni (%)	<p>$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah total keseluruhan rumah}} \times 100$</p> <p>Sumber Data: Dinas PUPR Kab. Tapin</p>	59,98	85,21
20	Meningkatnya keamanan daerah	Indeks rasa aman (poin)	<p>Hasil survey Indeks Rasa Aman (IRA)</p> <p>Sumber Data: Dinas PMPTSP Kab. Tapin, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapin</p>	100	96,08
21	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	a. Nilai SAKIP (predikat)	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten dari KemepanRB	100	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Capaian Kinerja tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021
			Sumber Data: Bag. Organisasi Setda Kab. Tapin, Inspektorat Kab. Tapin, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tapin, Bappelitbang Kab. Tapin		
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (predikat)	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah Sumber Data: Bag. Organisasi Setda Kab. Tapin, Inspektorat Kab. Tapin, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tapin, Bappelitbang Kab. Tapin	100	100
22	Meningkatnya kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (poin)	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia akb. Tapin	48,31	37,65
23	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	Survey tingkat kepuasan pelayanan sesuai dengan Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 Sumber Data: Dinas PMPTSP Kab. Tapin, Dinas DUKCAPIL Kab. Tapin, Bag. Organisasi Setda Kab. Tapin, Seluruh Kecamatan Kab. Tapin, Dinas KOMINFO kab. Tapin	104,49	118,83

3.2 PENGUKURAN KINERJA ATAS PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021

Hasil Pengukuran secara mandiri (self assessment) terhadap 6 (enam) Tujuan, 23 (dua puluh tiga) Sasaran Strategis dan 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Sasaran, yang dapat dirincikan bahwa dari 23 (dua puluh tiga) Sasaran Strategis terdapat 16 (enam belas) Indikator Sasaran Strategis yang tercapai dengan pencapaian $\geq 100\%$, sedangkan 12 (dua belas) Indikator Sasaran Strategis yang tercapai dengan pencapaian 75% s.d 100%, 4 (empat)

Indikator Sasaran Strategis yang tercapai dengan pencapaian antara 55%-75% dan masih terdapat 2 (dua) Indikator Sasaran Strategis yang tercapai dengan pencapaian <55%. Capaian indikator kinerja tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen dan perangkat daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Pengukuran kinerja atas perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021 dapat dirincikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 21 Pengukuran Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN KINERJA	
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing						
Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1	Rata-rata lama sekolah (poin)	8,72	7,77	89,11
		2	Harapan lama sekolah (poin)	13,34	11,95	89,58
		3	Rasio budaya baca (poin)	0,002679	0,006481	241,92
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (poin)	71,83	70,54	98,20
	Meningkatnya daya beli Masyarakat	1	Pengeluaran per kapita (Rp dalam ribu)	1.274.615	1.195.200	93,77
	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	1	Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang diselesaikan (%)	85	100	117,65
	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	84,92	84,15	99,09
		2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	73,32	64,97	88,61
Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa						
	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	23,53	15,4	65,45

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN KINERJA	
Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah		2	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	2,7	1,5	55,56
		3	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,6	1,8	112,50
		4	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	7,6	6,82	89,74
	Meningkatnya Sektor Pariwisata	1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	3,5	2,46	70,29
	Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM	1	Kontribusi sektor Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	1,5	1,27	84,67
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Indeks Desa Membangun (poin)	0,58	0,68	117,24
	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	1	Skor Pola Pangan Harapan (poin)	87	88,4	101,61
	Menurunnya Kemiskinan	1	Persentase penduduk miskin (%)	3,55	3,6	101,41
		2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin)	0,44	0,28	63,64
		3	Indeks Keparahan Kemiskinan (poin)	0,05	0,04	80,00
Menurunnya Pengangguran	1	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,6	4,96	137,78	
Misi 3: Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan						

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN KINERJA	
Meningkatkan kualitas infrastruktur	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	1	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	66	70,12	106,24
		2	Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	58	44	75,86
	Meningkatnya kualitas jaringan air bersih	1	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih (%)	60	68,11	113,52
	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	1	Luas areal sawah yang terairi (%)	71	17,08	24,06
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	1	Persentase bangunan gedung negara (gedung kantor dan gedung pelayanan publik) dalam kondisi baik (%)	48	87,55	182,40
	Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi	1	Persentase desa yang tersambung dengan jaringan komunikasi (%)	94	95,23	101,31
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	54,829	63,58	115,96
		2	Tingkat ketaatan terhadap RTRW (%)	63	80	126,98
	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	1	Persentase rumah layak huni (%)	97,98	83,48	85,21

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN KINERJA	
Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat						
Meningkatnya investasi	Meningkatnya keamanan daerah	1	Indeks rasa aman (poin)	0,51	0,49	96,08
Misi 5: Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)						
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1	Nilai SAKIP (predikat)	B	B	100%
		2	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (predikat)	W T P	W T P	100%
	Meningkatnya kualitas ASN	1	Indeks Profesionalitas ASN (poin)	99	37,27	37,65
	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	1	Nilai survey kepuasan masyarakat (point)	81	96,25	118,83

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS PENGUKURAN KINERJA ATAS PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021

Hasil analisis atas pengukuran secara mandiri (self assessment) terhadap 6 (enam) Tujuan, 23 (dua puluh tiga) Sasaran Strategis dan 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Sasaran, yang dapat dirincikan bahwa dari 23 (dua puluh tiga) Sasaran Strategis, 16 (enam belas) Indikator Sasaran Strategis yang tercapai dengan pencapaian $\geq 100\%$, sedangkan 12 (dua belas) Indikator Sasaran Strategis yang tercapai dengan pencapaian 75% s.d 100%, 4 (empat) Indikator Sasaran Strategis yang tercapai dengan pencapaian antara 55%-75% dan terdapat 2 (dua) Indikator Sasaran Strategis yang tercapai dengan pencapaian $< 55\%$. Capaian indikator kinerja tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen dan perangkat daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Uraian capaian tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran tahun 2021 sebagai berikut:

MISI 1:	MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG AGAMIS, SEHAT, CERDAS, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING
----------------	---

Untuk melaksanakan misi ini, Pemerintah Kabupaten Tapin telah menetapkan tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

TUJUAN 1	MENINGKATKAN KUALITAS SDM KABUPATEN TAPIN
-----------------	--

Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 5 (lima) Sasaran Strategis secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1	MENINGKATNYA AKSESABILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN
------------------	---

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada Tujuan I: Meningkatkan Kualitas SDM Kabupaten Tapin ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 1

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Rata-rata lama sekolah (poin)	8,72	7,77	89,11%
Harapan lama sekolah (poin)	13,34	11,95	89,58%
Rasio budaya baca (poin)	0,002679	0,006481	241,92%
RATA-RATA			140,20%

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan tercapai 140,20%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan target RPJMD tahun 2021 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD Misi 1

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2021	2023
Rata-rata lama sekolah (poin)	7,53	7,75	7,76	7,77	8,72	9,61
Harapan lama sekolah (poin)	11,52	11,86	11,94	11,95	13,34	14
Rasio budaya baca (poin)	0,002665	0,004831	0,002994	0,006481	0,002679	0,002691

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Aksesabilitas Dan Kualitas Pendidikan didukung oleh program sebagai berikut:

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	73.032.425.170	45.612.914.284	62,46%
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11.449.900	6.439.200	56,24%
3	Program Pembinaan Perpustakaan	597.850.700	582.567.268,00	97,44%

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Aksesabilitas Dan Kualitas Pendidikan tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Realisasi kinerja keuangan program Pengelolaan Pendidikan Tahun 2021 adalah sebesar Rp45.612.914.284 atau 62,46% dari anggaran sebesar Rp73.032.425.170.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Rp	6.740.852.400
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp	15.714.803.484
3	Pengelolaan Pendidikan sekolah Menengah Pertama	Rp	19.912.489.900
4	Pengelolaan pendidikan Non Forma/kesetaraan	Rp	3.244.768.500

2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Realisasi kinerja keuangan program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021 adalah sebesar Rp6.439.200 atau 56,24% dari anggaran sebesar Rp11.449.900.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, paud, dan pendidikan non formal/kesetaraan	Rp	6.439.200

3. Program Pembinaan Perpustakaan

Realisasi kinerja keuangan program Pembinaan Perpustakaan Tahun 2021 adalah sebesar Rp582.567.268 atau 97,44% dari anggaran sebesar Rp597.850.700.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pembudayaan gemar membaca taingkat daerah kabupaten/kota	Rp	72.944.500
2	Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	Rp	509.622.768



SASARAN 2	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
------------------	--

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 pada **Tujuan I: Meningkatkan Kualitas SDM Kabupaten Tapin** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Angka Harapan Hidup (poin)	71,83	70,54	98,20

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah Tercapai 98,20%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan target RPJMD tahun 2021 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2021	2023
Angka Harapan Hidup (poin)	69,72	70,23	70,4	70,54	71,83	73,28

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat didukung oleh program sebagai berikut:

No.	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	44.643.129.267	33.754.301.424	75,61%
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.515.931.800	8.359.334.973	87,85%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	860.688.700	524.377.600	60,93%

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Realisasi kinerja keuangan program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2021 adalah sebesar Rp33.754.301.424 atau 75,61% dari anggaran sebesar Rp44.643.129.267.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D Serta Fasilitas Pelanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	256.240.000,00
2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Rp	18.940.012.932,00
3	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	14.553.643.492,00
4	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rp	4.405.000,00

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Realisasi kinerja keuangan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2021 adalah sebesar Rp8.359.334.973 atau 87,85% dari anggaran sebesar Rp9.515.931.800.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/kota	Rp	8.359.334.973,00

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Realisasi kinerja keuangan program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2021 adalah sebesar Rp524.377.600 atau 60,93% dari anggaran sebesar Rp860.688.700.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No.	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Advokasi, pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	505.127.800
2	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	19.249.800

SASARAN 3	MENINGKATNYA DAYA BELI MASYARAKAT
------------------	--

Capaian kinerja Sasaran Strategis 3 pada **Tujuan I: Meningkatkan Kualitas SDM Kabupaten Tapin** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Pengeluaran Per Kapita (Rp)	1.274.615	1.195.200	93,77%

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis meningkatnya daya beli masyarakat adalah Tercapai 93,77%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan target RPJMD tahun 2021 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2021	2023
Pengeluaran Per Kapita (Rp)	1.141.700	1.208.800	1.184.100	1.195.200	1.274.615	1.323.595

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Daya Beli Masyarakat didukung oleh program sebagai berikut :

No.	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	968.630.300	761.224.814	78,59%

Program Perekonomian dan Pembangunan

Realisasi kinerja keuangan program Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2021 adalah sebesar Rp761.224.814 atau 78,59% dari anggaran sebesar Rp968.630.300.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp	49.189.500
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp	31.050.000
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	646.250.314
4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp	34.735.000

SASARAN 4	MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN
------------------	---

Capaian kinerja Sasaran Strategis 4 pada **Tujuan I: Meningkatkan Kualitas SDM Kabupaten Tapin** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase Potensi Kasus/Kejadian Konflik Yang Diselesaikan (%)	85	100	117,65

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan adalah Tercapai 117,65%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan target RPJMD tahun 2021 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2021	2023
Persentase Potensi Kasus/Kejadian Konflik Yang Diselesaikan (%)	78	100	100	100	85	86,67

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan didukung oleh program sebagai berikut:

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.017.394.700	1.930.276.400	95,68%
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.165.369.400	1.148.867.200	98,58%
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	55.799.600	42.399.800	75,99%
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	75.229.600	43.214.600	57,44%
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial	120.947.300	33.477.900	27,68%



1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Realisasi kinerja keuangan program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.930.276.400 atau 95,68% dari anggaran sebesar Rp2.017.394.700.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	1.930.276.400

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Realisasi kinerja keuangan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.148.867.200 atau 98,58% dari anggaran sebesar Rp1.165.369.400.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Rp	1.148.867.200

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Realisasi kinerja keuangan program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2021 adalah sebesar Rp42.399.800 atau 75,99% dari anggaran sebesar Rp55.799.600.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
----	----------	----	--------------------

1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	42.399.800
---	--	----	------------

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Realisasi kinerja keuangan program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 2021 adalah sebesar Rp43.214.600 atau 57,44% dari anggaran sebesar Rp75.229.600.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp	43.214.600

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial

Realisasi kinerja keuangan program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial Tahun 2021 adalah sebesar Rp33.477.900 atau 27,68% dari anggaran sebesar Rp120.947.300.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp	33.477. 900

SASARAN 5	MENINGKATNYA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN GENDER
------------------	---

Capaian kinerja Sasaran Strategis 5 pada **Tujuan I: Meningkatkan Kualitas SDM Kabupaten Tapin** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	Realisasi 2021	% CAPAIAN
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (POIN)	84,92	84,15	99,09%
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (POIN)	73,32	64,97	88,61%
RATA-RATA			93,85%

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender adalah Tercapai 93,85%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan target RPJMD tahun 2021 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2021	2023
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (POIN)	83,87	84,44	84,09	84,15	84,92	85,3
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (POIN)	72,99	65,16	64,97	64,97	73,32	73,47

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan didukung oleh program sebagai berikut:

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	192.128.900	142.326.100	74,08%
2	Program Perlindungan Perempuan	78.705.100	60.920.000	77,40%
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	428.364.900	387.442.000	90,45%
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	97.617.100	94.670.200	96,98%
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	351.913.200	277.809.450	78,94%
6	Program Perlindungan Khusus Anak	58.355.900	42.581.200	72,97%

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Realisasi kinerja keuangan program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2021 adalah sebesar Rp142.326.100 atau 74,08% dari anggaran sebesar Rp192.128.900.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	50.834.300
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	15.178.700
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	76.313.100

2. Program Perlindungan Perempuan

Realisasi kinerja keuangan program Perlindungan Perempuan Tahun 2021 adalah sebesar Rp60.920.000 atau 77,40 % dari anggaran sebesar Rp78.705.100

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp	11.890.000
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	42.425.000
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.605.000

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Realisasi kinerja keuangan program Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2021 adalah sebesar Rp387.442.00 atau 90,45% dari anggaran sebesar Rp428.364.900.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	272.119.600
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	115.322.400

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Realisasi kinerja keuangan program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Tahun 2021 adalah sebesar Rp94.670.200 atau 96,98% dari anggaran sebesar Rp97.617.100.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	94.670.200

5. Program Perlindungan Khusus Anak

Realisasi kinerja keuangan program Perlindungan Khusus Anak Tahun 2021 adalah sebesar Rp277.809.450 atau 78,94% dari anggaran sebesar Rp351.913.200

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	50.672.200
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	227.137.250

6. Program Perlindungan Khusus Anak

Realisasi kinerja keuangan program Perlindungan Khusus Anak Tahun 2021 adalah sebesar Rp42.581.200 atau 71,56 % dari anggaran sebesar Rp58.355.900.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp	9.284.000
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	10.985.000
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	22.312.200

MISI 2	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS BERBASIS AGROBISNIS DAN PARIWISATA YANG DIMULAI DARI DESA
---------------	---

Untuk melaksanakan misi ini, Pemerintah Kabupaten Tapin telah menetapkan tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut;

TUJUAN 1	MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH
-----------------	---

Capaian Tujuan Pertama pada Misi Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa yakni “Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah”. Tujuan tersebut dicapai dengan 5 (lima) Sasaran Strategis secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1	MENINGKATNYA SEKTOR AGROBISNIS
------------------	---------------------------------------

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada Tujuan I: Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 2

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	23,53	15,4	65,45
Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	2,7	1,5	55,56
Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,6	1,8	112,50

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	7,6	6,82	89,74

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Sektor Agrobisnis adalah untuk Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tidak tercapai target sebesar 34,55%, Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB tidak tercapai target 44,44%, Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB tercapai melebihi target sebesar 12,50% sedangkan untuk Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB tidak tercapai target sebesar 10,26%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan target RPJMD tahun 2021 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 25. Perbandingan Relalisasi Kinerja dengan Taarget RPJMD

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2021	2023
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	21,75	20,50	21,22	15,4	23,53	24,3
Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	2,3	1,48	1,49	1,5	2,7	2,9
Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,3	1,85	1,91	1,8	1,6	1,8
Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	7,03	6,80	6,69	6,82	7,6	8

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Sektor Agrobisnis didukung oleh program sebagai berikut :

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	238.149.000	211.878.500	88,97%
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.780.491.350	1.731.116.930	97,23%
3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	157.504.600	147.839.600	93,86%
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.792.871.870	3.490.009.431	92,01%
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	13.004.840.360	10.932.988.332	84,07%

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	244.047.070	225.125.856	92,25%
7	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	530.336.300	455.049.000	85,80%
8	Program Perizinan Usaha Pertanian	60.465.000	29.945.100	49,52%
9	Program Penyuluhan Pertanian	2.623.751.100	2.393.328.786	91,22%
10	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	699.493.000	450.346.559	64,38%
11	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	8.289.800	-	-
12	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industrial Nasional	707.135.500	553.462.900	78,27%

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Realisasi kinerja keuangan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Tahun 2021 adalah sebesar Rp211.878.500 atau 88,97% dari anggaran sebesar Rp238.149.000.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	208.416.000
2.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.462.500

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Realisasi kinerja keuangan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.731.116.930 atau 97,23% dari anggaran sebesar Rp1.780.491.350

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp	12.500.000
2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp	1.718.616.930

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Realisasi kinerja keuangan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2021 adalah sebesar Rp147.839.600 atau 93,86% dari anggaran sebesar Rp157.504.600.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Rp	36.000.000
2	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	103.389.600
3	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Rp	8.450.000

4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Realisasi kinerja keuangan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun 2021 adalah sebesar Rp3.490.009.431 atau 92,01% dari anggaran sebesar Rp3.792.871.870.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp	1.811.362.677
2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	66.133.450
3	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.612.513.304

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Realisasi kinerja keuangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Tahun 2021 adalah sebesar Rp10.932.988.332 atau 84,07% dari anggaran sebesar Rp13.004.840.360.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	161.540.000
2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp	10.771.448.332

6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Realisasi kinerja keuangan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2021 adalah sebesar Rp225.125.856 atau 92,25% dari anggaran sebesar Rp244.047.070.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp	96.614.656
2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.750.000
3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah	Rp	33.912.400
4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	90.848.800

7. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Realisasi kinerja keuangan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tahun 2021 adalah sebesar Rp455.049.000 atau 85,80% dari anggaran sebesar Rp530.336.300.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp	455.049.000



8. Program Perizinan Usaha Pertanian

Realisasi kinerja keuangan Program Perizinan Usaha Pertanian Tahun 2021 adalah sebesar Rp29.945.100. atau 49,52% dari anggaran sebesar Rp60.465.000

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	29.945.100

9. Program Penyuluhan Pertanian

Realisasi kinerja keuangan Program Penyuluhan Pertanian Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.393.328.786 atau 91,22% dari anggaran sebesar Rp2.623.751.100.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp	2.393.328.786

10. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Realisasi kinerja keuangan Program Penyuluhan Pertanian Tahun 2021 adalah sebesar Rp450.346.559 atau 64,38% dari anggaran sebesar Rp699.493.000.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp	450.346.559

11. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Dari anggaran sebesar Rp8.289.800 Untuk Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Tahun 2021 tidak ada realisasi kinerja keuangan barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Rp	0,-

12. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industrial Nasional

Realisasi kinerja keuangan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industrial Nasional Tahun 2021 adalah sebesar Rp553.462.900 atau 78,27% dari anggaran sebesar Rp181.450.000,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	553.462.900

SASARAN 2	MENINGKATNYA SEKTOR PARIWISATA
------------------	---------------------------------------

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 pada **Tujuan I: Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	3,5	2,46	70,29

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Sektor Pariwisata adalah tidak tercapai target sebesar 29,71%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan target RPJMD tahun 2021 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2021	2023
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	2,7	5,95	5,76	2,46	3,5	4



Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Sektor Pariwisata didukung oleh program sebagai berikut :

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.621.364.472	2.509.316.810	95,73%
2	Program Pemasaran Pariwisata	300.504.200	219.103.000	72,91%
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	63.552.300	49.018.000	77,13%

Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran Meningkatnya Sektor Pariwisata tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.509.316.810 atau 95,73% dari anggaran sebesar Rp2.621.364.472.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp	22.124.200
2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp	2.487.192.610

2. Program Pemasaran Pariwisata

Realisasi kinerja keuangan Program Pemasaran Pariwisata Tahun 2021 adalah sebesar Rp219.103.000 atau 72,91% dari anggaran sebesar Rp300.504.200

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	Rp	219.103.000

3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Realisasi kinerja keuangan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 adalah sebesar Rp 49.018.000 atau 77,13% dari anggaran sebesar Rp 63.552.300.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp	49.018.000

SASARAN 3	MENINGKATNYA SEKTOR KOPERASI DAN UKM
------------------	---

Capaian kinerja Sasaran Strategis 3 pada **Tujuan I: Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Kontribusi sektor Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	1,5	1,27	84.67

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM adalah tidak tercapai target sebesar 15,33%.



Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan target RPJMD tahun 2021 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2021	2023
Kontribusi sektor Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	1,2	1,23	1,30	1,27	1,5	1,7

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM didukung oleh program sebagai berikut :

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	12.699.800	12.699.800	100%
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	6.549.800	-	-
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	27.799.800	27.540.000	99,07%
4	Program Pengembangan UMKM	52.597.500	6.569.500	12,49%

Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp12.699.800 atau 100% dari anggaran sebesar Rp12.699.800

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	12.699.800

2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Dari anggaran sebesar Rp6.549.800 belum ada realisasi kinerja keuangan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	0,-

3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Realisasi kinerja keuangan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp27.540.000 atau 99,07% dari anggaran sebesar Rp27.799.800

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	27.540.000

4. Program Pengembangan UMKM

Realisasi kinerja keuangan Program Pengembangan UMKM Tahun 2021 adalah sebesar Rp6.569.500 atau 12,49% dari anggaran sebesar Rp52.597.500

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp	6.569.500

SASARAN 4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa
------------------	--

Capaian kinerja Sasaran Strategis 4 pada **Tujuan I: Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Indeks Desa Membangun (poin)	0,58	0,68	117,24

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah tercapai melebihi target sebesar 17,24%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan target RPJMD tahun 2021 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2021	2023
Indeks Desa Membangun (poin)	0,55	0,63	0,65	0,68	0,58	0,6

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa didukung oleh program sebagai berikut:

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.786.706.076	1.659.193.164	92,86%
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	603.463.700	563.407.400	93,36%
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.037.612.500	1.968.542.700	97%
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	11.285.944.580	8.646.272.457	76,61

Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Kerjasama Desa Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.659.193.164 atau 92,86% dari anggaran sebesar Rp1.786.706.076.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Rp	1.659.193.164

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Realisasi kinerja keuangan Program Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2021 adalah sebesar Rp563.407.400 atau 93,36% dari anggaran sebesar Rp603.463.700.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	563.407.400

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Realisasi kinerja keuangan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.968.542.700 atau 97% dari anggaran sebesar Rp2.037.612.500.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.968.542.700

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Realisasi kinerja keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2021 adalah sebesar Rp8.646.272.457 atau 76,61% dari anggaran sebesar Rp11.285.944.580

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp	8.646.272.457

Capaian sasaran strategis 5 pada tujuan Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah adalah

SASARAN 5	Meningkatnya kemandirian pangan daerah
------------------	---

Capaian kinerja Sasaran Strategis 5 pada **Tujuan I: Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Skor Pola Pangan Harapan (poin)	87	88,4	101,61

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kemandirian pangan daerah adalah melebihi target sebesar 1,61%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan target RPJMD tahun 2021 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2021	2023
Skor Pola Pangan Harapan (poin)	86,2	98,2	84,5	88,4	87	90

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kemandirian pangan daerah didukung oleh program sebagai berikut :

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	3.544.411.300	3.468.152.048	97,85%
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	78.950.200	74.669.500	94,58%
3	Program Penanganan Keamanan Pangan	36.299.000	35.871.000	98,82%

Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran Meningkatnya kemandirian pangan daerah tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 adalah sebesar Rp3.468.152.048 atau 97,85% dari anggaran sebesar Rp3.544.411.300.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp	218.960.600
2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp	2.567.329.248
3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Konsumsi Gizi	Rp	681.862.200

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Realisasi kinerja keuangan Program Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2021 adalah sebesar Rp74.669.500 atau 94,58% dari anggaran sebesar Rp78.950.200.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Rp	68.330.400
2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	6.339.100

3. Program Penanganan Keamanan Pangan

Realisasi kinerja keuangan Program Penanganan Keamanan Pangan Tahun 2021 adalah sebesar Rp35.871.000 atau 98,82% dari anggaran sebesar Rp36.299.000.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp	35.871.000

Pencapaian tujuan I: Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah pada misi 2 RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 didukung oleh Sasaran Strategis 6 yakni sebagai berikut:

SASARAN 6	MENURUNNYA KEMISKINAN
------------------	------------------------------

Capaian kinerja Sasaran Strategis 6 pada **Tujuan I: Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase penduduk miskin (%)	3,55	3,6	101,41
Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin)	0,44	0,28	63,64
Indeks Keparahan Kemiskinan (poin)	0,05	0,04	80,00

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis menurunnya kemiskinan adalah untuk Persentase penduduk miskin tercapai melebihi target sebesar 1,41%. Indeks Kedalaman Kemiskinan tidak tercapai target sebesar 36,36% sedangkan untuk Indeks Keparahan Kemiskinan tidak tercapai target sebesar 20%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan target RPJMD tahun 2021 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2021	2023
Persentase penduduk miskin (%)	3,76	3,41	3,06	3,6	3,55	3,35
Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin)	0,41	0,46	0,45	0,28	0,44	0,46
Indeks Keparahan Kemiskinan (poin)	0,08	0,09	0,12	0,04	0,05	0,03

Dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan didukung oleh program sebagai berikut :

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Pemberdayaan Sosial	3.300.393.300	3.096.185.100	93,81%
2	Program Rehabilitasi Sosial	2.963.670.900	2.305.259.300	77,78%
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.201.760.100	674.087.800	56,09%

1. Program Pemberdayaan Sosial

Realisasi kinerja keuangan Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2021 adalah sebesar Rp3.096.185.100 atau 93,81% dari anggaran sebesar Rp3.300.393.300. Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.300.393.300

2. Program Rehabilitasi Sosial

Realisasi kinerja keuangan Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.305.259.300 atau 77.78% dari anggaran sebesar Rp2.963.670.900. Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial	Rp	2.300.427.300
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial	Rp	4.832.000

3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Realisasi kinerja keuangan Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Tahun 2021 adalah sebesar Rp674.087.800 atau 56,09% dari anggaran sebesar Rp1.2013760.100. Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	674.087.800

Pencapaian tujuan I: Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah pada misi 2 RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 didukung oleh Sasaran Strategis 7 yakni sebagai berikut:

SASARAN 7	MENURUNNYA PENGANGGURAN
------------------	--------------------------------

Capaian kinerja Sasaran Strategis 7 pada **Tujuan I: Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,6	4,96	137,78

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas. dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis menurunnya pengangguran adalah tercapai melebihi target sebesar 37,78%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan target RPJMD tahun 2021 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2021	2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,25	3,65	3,73	4,96	3,6	3,2

Dalam pencapaian sasaran strategis menurunnya pengangguran didukung oleh program sebagai berikut :

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	430.653.000	422.493.250	98,11%
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	992.738.900	968.929.389	97,60%
3	Program Hubungan Industrial	163.876.400	141.893.300	86,59%

Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran menurunnya pengangguran tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Realisasi kinerja keuangan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2021 adalah sebesar Rp422.493.250 atau 98,11% dari anggaran sebesar Rp430.653.000

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rp	414.960.750
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp	7.532.500

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Realisasi kinerja keuangan Program Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2021 adalah sebesar Rp968.929.389 atau 97.60% dari anggaran sebesar Rp992.738.900.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI
1	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	19.091.500
2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp	99.380.589
3	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	850.457.300

3. Program Hubungan Industrial

Realisasi kinerja keuangan Program Hubungan Industrial Tahun 2021 adalah sebesar Rp141.893.300 atau 86,59% dari anggaran sebesar Rp163.876.400.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	20.298.200
2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	121.595.100

MISI 3:

MEMANTAPKAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN SECARA BERKELANJUTAN

Untuk melaksanakan misi ini, Pemerintah Kabupaten Tapin telah mencapai tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut;

TUJUAN 1

MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR

Capaian Tujuan Pertama pada Misi Memantapkan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Secara Berkelanjutan yakni “Meningkatkan Kualitas Infrastruktur”

Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 5 (lima) Sasaran Strategis secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada **Tujuan I: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	66	70,12	106.24%
Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	58	44	75.86%
		RATA-RATA	91,05%

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan adalah Tercapai 91,05%

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan target RPJMD tahun 2021 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 26 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2021	2023
Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	54,32	74,16	80,77	70,12	66	75
Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	49	53,08	68,6	44	58	65

Dalam pencapaian sasaran strategis Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Jalan didukung oleh program sebagai berikut:

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Penyelenggaraan Jalan	198.999.981.454,-	157.978.397.914,-	79.39 %

Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Jalan tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Jalan

Realisasi kinerja keuangan program Penyelenggaraan Jalan Tahun 2021 adalah sebesar Rp157.978.397.914,- atau 79.39 % dari anggaran sebesar Rp198.999.981.454,-.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp	157.978.397.914,-

SASARAN 2	MENINGKATNYA KUALITAS JARINGAN AIR BERSIH
------------------	---

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 pada **Tujuan I: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih (%)	60	68.11	113,52%

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis meningkatnya Kualitas Jaringan Air Bersih adalah Tercapai 113,52%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan target RPJMD tahun 2021 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2021	2023
Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih (%)	55,65	59,65	62,83	68,11	60	64

Dalam pencapaian sasaran strategis Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Jaringan Air Bersih didukung oleh program sebagai berikut:

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.820.226.000,-	10.490.612.265,-	96.95 %

Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Jaringan Air Bersih diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Realisasi kinerja keuangan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2021 adalah sebesar Rp10.490.612.265,- atau 96,95 % dari anggaran sebesar Rp10.820.226.000,-

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	10.490.612.265,-

SASARAN 3	MENINGKATNYA KUALITAS JARINGAN IRIGASI
------------------	---

Capaian kinerja Sasaran Strategis 3 pada **Tujuan I: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Luas areal sawah yang terairi (%)	71	17,08	24,06 %

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi adalah Tidak Tercapai, dengan pencapaian sebesar 24,06%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan target RPJMD tahun 2021 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2021	2023
Luas areal sawah yang terairi (%)	66	31,97	36,5	17,08	71	75

Dalam pencapaian sasaran strategis Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi didukung oleh program sebagai berikut :

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	870.000.000,-	862.829.000,-	99,18 %
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	51.155.626.902,-	46.852.508.316,-	91,59 %

Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Realisasi kinerja keuangan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Tahun 2021 adalah sebesar Rp862.829.000,- atau 99,18 % dari anggaran sebesar Rp870.000.000,-

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	862.829.000,-

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Realisasi kinerja keuangan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Tahun 2021 adalah sebesar Rp46.852.508.316,- atau 91,59 % dari anggaran sebesar Rp51.155.626.902,-

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	Rp	24.468.562.857,-
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer	Rp	22.383.945.459,-

SASARAN 4	MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK
------------------	--

Capaian kinerja Sasaran Strategis 4 pada **Tujuan I: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase bangunan gedung negara (gedung kantor dan gedung pelayanan public) dalam kondisi baik (%)	48	87.55	182,40 %

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pelayanan Publik adalah Tercapai 182,40%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan target RPJMD tahun 2021 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2021	2023
Persentase bangunan gedung negara (gedung kantor dan gedung pelayanan publik) dalam kondisi baik (%)	29	44,06	48,57	87.55	48	64

Dalam pencapaian sasaran strategis Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pelayanan Publik didukung oleh program sebagai berikut :

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2.530.000.000,-	2.427.891.000,-	95,96 %
2	Program Penataan Bangunan Gedung	239.121.461.372,-	192.292.705.684,-	80,42 %
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.312.107.472,-	2.257.183.140,-	97,62 %
4	Program Pengelolaan Pelayaran	831.873.100,-	714.789.000,-	85,93 %
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9.915.274.210,-	9.844.007.460,-	99,28 %

Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pelayanan Publik diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Realisasi kinerja keuangan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.427.891.000,- atau 95,96 % dari anggaran sebesar Rp2.530.000.000,-

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.427.891.000,-

2. Program Penataan Bangunan Gedung

Realisasi kinerja keuangan Program Penataan Bangunan Gedung Tahun 2021 adalah sebesar Rp192.292.705.684,- atau 80,42 % dari anggaran sebesar Rp239.121.461.372,-

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah	Rp	192.292.705.684,-

3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Realisasi kinerja keuangan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.257.183.140,- atau 97,62% dari anggaran sebesar Rp2.312.107.472,-

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp	70.049.800,-
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp	138.688.700,-
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp	66.000.000,-
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp	293.505.990,-
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp	1.498.600.100,-
6	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp	75.672.200,-
7	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp	39.600.000,-
8	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	75.066.350,-

4. Program Pengelolaan Pelayaran

Realisasi kinerja keuangan Program Pengelolaan Pelayaran Tahun 2021 adalah sebesar Rp714.789.000,- atau 85,93 % dari anggaran sebesar Rp831.873.100,-

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pembangunan dan Penerbitan Izin	Rp	585.189.000,-
2	Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp	129.600.000,-

5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Realisasi kinerja keuangan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Tahun 2021 adalah sebesar Rp9.884.007.460,- atau 99,28 % dari anggaran sebesar Rp9.915.274.210,-

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.078.464.500,-
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	998.895.820,-
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp	850.355.040,-
4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Rp	5.615.541.100,-
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp	1.300.751.000,-

TUJUAN 1	MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR
-----------------	--

Capaian Tujuan satu pada Misi Memantapkan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Secara Berkelanjutan yakni “Meningkatkan Kualitas infrastruktur”

Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 2 (Dua) Sasaran Strategis secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 5	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN JARINGAN KOMUNIKASI
------------------	--

Capaian kinerja Sasaran Strategis 5 pada **Tujuan I: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase desa yang tersambung dengan jaringan komunikasi (%)	94	95,23	101,31 %

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Jaringan Komunikasi adalah Tercapai 101,31%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan target RPJMD tahun 2021 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2021	2023
Persentase desa yang tersambung dengan jaringan komunikasi (%)	85	95	95	95,23	94	98

Dalam pencapaian sasaran strategis Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Jaringan Komunikasi didukung oleh program sebagai berikut :

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Aplikasi Informatika	496.484.000,-	479.601.907,-	96,60%
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	990.012.200,-	988.328.300,-	99,83%

Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Jaringan Komunikasi diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Aplikasi Informatika

Realisasi kinerja keuangan Program Aplikasi Informatika Tahun 2021 adalah sebesar Rp479.601.907,- atau 96,60% dari anggaran sebesar Rp496.484.000,-

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	339.385.835,-
2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	140.216.072,-

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Realisasi kinerja keuangan Program Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2021 adalah sebesar Rp988.328.300,- atau 99,83 % dari anggaran sebesar Rp990.012.200,-

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	988.328.300,-

TUJUAN 2	MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
-----------------	---

Capaian Tujuan Kedua pada Misi Memantapkan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Secara Berkelanjutan yakni “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”

Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 2 (Dua) Sasaran Strategis secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1	MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN YANG MEMPERHATIKAN RTRW DAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
------------------	--

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada **Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	54,829	63,58	115,96
Tingkat ketaatan terhadap RTRW (%)	63	80	126,98
RATA-RATA			121,47%

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah Tercapai dengan rata-rata 121,47%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan target RPJMD tahun 2021 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2021	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	53.71	63.00	69,09	63,58	54.829	55.015
Tingkat ketaatan terhadap RTRW (%)	46	60	65	80	63	75

Dalam pencapaian sasaran strategis Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan yang Memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan didukung oleh program sebagai berikut :

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	89.225.300	87.829.400	98,44
2	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	2.133.096.000	2.043.196.300	95,79
3	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.023.681.092	973.814.880	95,13
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	46.726.500	34.167.700	73,12
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	29.653.400	27.459.900	92,60
6	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	74.107.000	73.694.517	99,44



Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan yang Memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Realisasi kinerja keuangan Program Perencanaan Lingkungan Hidup Tahun 2021 adalah sebesar Rp87.829.400,00 atau 98,44 % dari anggaran sebesar Rp89.225.300,00.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Rp	87.829.400,00

2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Realisasi kinerja keuangan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.043.196.300,00 atau 95,79 % dari anggaran sebesar Rp2.133.096.000,00



Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp	2.043.196.300,00

3. Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Realisasi kinerja keuangan Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2021 adalah sebesar Rp973.814.880,00 atau 95,13% dari anggaran sebesar Rp1.023.681.092,00

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	531.879.080,00
2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	210.112.300,00
3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	231.823.500,00

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Realisasi kinerja keuangan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Tahun 2021 adalah sebesar Rp34.167.700,00 atau 73,12% dari anggaran sebesar Rp46.726.500,00

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penyimpanan sementara Limbah B3	Rp	34.167.700,00

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Realisasi kinerja keuangan Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Tahun 2021 adalah sebesar Rp27.459.900,00 atau 92,60 % dari anggaran sebesar Rp29.653.400,00

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	27.459.900,00

6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Realisasi kinerja keuangan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.610.148.917,00 atau 99,12 % dari anggaran sebesar Rp1.624.399.400,00

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp	73.694.517,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp	838.229.600,00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp	560.444.400,00
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp	37.780.400,00

SASARAN 2	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN PERUMAHAN
------------------	---

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 pada **Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase rumah layak huni (%)	97,98	83,48	85,21

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan adalah Tidak Tercapai dengan perentase capaian kinerja sebesar 85,21%

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan target RPJMD tahun 2021 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2021	2023
Persentase rumah layak huni (%)	97,62	97,56	58,70	83,48	97,98	98,22

Dalam pencapaian sasaran strategis Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan didukung oleh program sebagai berikut :

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Pengembangan Perumahan	5.011.00.000	1.539.250.000	30,71
2	Program Kawasan Permukiman	1.451.020.000	1.396.341.000	96,23
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.521.493.000	2.403.542.646	95,32
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	11.579.495.100	10.734.209.672	92,7

Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan

Realisasi kinerja keuangan Program Pengembangan Perumahan Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.539.250.000 atau 30,71 % dari anggaran sebesar Rp5.011.900.000.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp	1.539.250.000

2. Program Kawasan Permukiman

Realisasi kinerja keuangan Program Kawasan Permukiman Tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.396.341.000 atau 96,23% dari anggaran sebesar Rp1.451.020.000.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp	206.525.000
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp	1.189.816.000

3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Realisasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.403.542.646 atau 95,32% dari anggaran sebesar Rp2.521.493.000

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp	2.403.542.646

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Realisasi Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Tahun 2021 adalah sebesar Rp10.734.209.672 atau 92,7% dari anggaran sebesar Rp11.579.495.100

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp	10,734,209,672

MISI 4:	MEWUJUDKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DEMI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
----------------	---

Untuk melaksanakan misi ini, Pemerintah Kabupaten Tapin telah mencapai tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut;

TUJUAN 1	MENINGKATNYA INVESTASI
-----------------	-------------------------------

Capaian Tujuan Pertama pada Misi Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif demi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”

Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 1 (satu) Sasaran Strategis sebagai berikut :

SASARAN 1	MENINGKATNYA KEAMANAN DAERAH
------------------	-------------------------------------

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada **Tujuan I: Meningkatnya Investasi** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Indeks rasa aman (poin)	0,51	0,49	96,08%

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis meningkatnya keamanan daerah adalah Terpenuhi 96,08%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan target RPJMD tahun 2021 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2021	2023
Indeks rasa aman (poin)	0	0,49	0,50	0,49	0,51	0,53

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Keamanan Daerah didukung oleh program sebagai berikut :

NO	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	676.384.800	617.949.800	91,36

Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran Meningkatkan Investasi tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

Realisasi kinerja keuangan program Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2021 adalah sebesar Rp617.949.800,00 atau 91,36% dari anggaran sebesar Rp676.384.800,00.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp.	REALISASI ANGGARAN
1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	617.949.800,00

MISI 5:	MENGEDEPANKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH SERTA MAMPU MENCIPTAKAN IKLIM PELAYANAN PUBLIK YANG MAKSIMAL (GOOD AND CLEAN GOVERNMENT)
----------------	---

Untuk melaksanakan misi ini, Pemerintah Kabupaten Tapin telah mencapai tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut;

TUJUAN 1	TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, AKUNTABEL DAN MELAYANI MASYARAKAT
-----------------	--

Capaian Tujuan Pertama pada Misi Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan

Publik yang Maksimal yakni “Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani Masyarakat”

Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 3 (tiga) Sasaran Strategis secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN
------------------	--

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada **Tujuan I: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 5

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Nilai SAKIP (predikat)	B	B	100
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemda (predikat)	WTP	WTP	100

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan adalah Tercapai 100%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan target RPJMD tahun 2021 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD Misi 5

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2021	2023
Nilai SAKIP (predikat)	B	B	B	B	B	BB
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemda (predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan didukung oleh program sebagai berikut:

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.710.574.700	1.428.450.950	83,51
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	955.863.300	850.187.904	88,94
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	202.105.369.412	78.753.715.549	38,97
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38.910.753.122	36.547.454.049	93,93

5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	367.275.600	314.264.600	85,57
6	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	716.367.500	314.264.600	85,57

Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Realisasi kinerja keuangan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.428.450.950,00 atau 83,51% dari anggaran sebesar Rp1.710.574.700,001

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp	1.053.324.750
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	180.489.900
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	194.636.300

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Realisasi kinerja keuangan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 adalah sebesar Rp850.187.904,00 atau 88,94% dari anggaran sebesar Rp955.863.300,00

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp	428.787.404,00
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp	208.525.500,00
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp	212.875.000,00

3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi kinerja keuangan Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021 adalah sebesar Rp78.753.715.549,00 atau 38,97% dari anggaran sebesar Rp202.105.369.412,00

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp	1.170.491.800
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp	277.817.500
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp	383.700.200
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	76.921.706.049

4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi kinerja keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 adalah sebesar Rp36.547.454.049 atau 93,93% dari anggaran sebesar Rp38.910.753.122

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	24.277.074.462,00
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	4.525.115.715,00
3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	83.606.900,00
4	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp	2.950.765.700,00
5	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp	109.495.400,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.584.510.043,00
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	1.272.382.364,00
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	633.129.765,00
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp	9.510.000,00
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp	1.026.400.100,00
11	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	75.463.600,00

5. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Realisasi kinerja keuangan Program Penyelenggaraan Pengawasan Tahun 2021 adalah sebesar Rp314.264.600,00 atau 85,57% dari anggaran sebesar Rp367.275.600,00

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp	286.601.100
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp	27.663.500

6. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Realisasi kinerja keuangan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tahun 2021 adalah sebesar Rp184.695.475,00 atau 25,78% dari anggaran sebesar Rp716.367.500,00

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI
1	Pendampingan dan Asistensi	Rp	177.154.475
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp	7.541.000

SASARAN 2	MENINGKATNYA KUALITAS ASN
------------------	----------------------------------

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 pada **Tujuan I: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	99	37,27	37,65

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis meningkatnya kualitas ASN adalah Tidak Tercapai 37,65%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan target RPJMD tahun 2021 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2021	2023
Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	0	0	47,83	37,27	99	99

Dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan didukung oleh program sebagai berikut :

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.098.340.300	2.535.946.000	81,85

Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

4. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Realisasi kinerja keuangan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.535.946.000,00 atau 81,85% dari anggaran sebesar Rp3.098.340.300,00

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI
1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp	247.588.000
2	Pengembangan kompetensi asn	Rp	1.683.734.900
3	Mutasi dan promosi asn	Rp	202.824.200
4	Pengadaan pemberhentian dan informasi kepegawaian	Rp	330.083.900
5	Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Rp	71.715.000

SASARAN 3	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT
------------------	--

Capaian kinerja Sasaran Strategis 3 pada **Tujuan I: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin)	81	96,25	118,83

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat adalah Tercapai 118,83%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan target RPJMD tahun 2021 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2021	2023
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin)	76	75	82,55	96,25	81	85

Dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan didukung oleh program sebagai berikut :

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.931.530.000	3.556.351.636	90,46
2	Program Pendaftaran Penduduk	164.375.800	161.272.900	98,11
3	Program Pencatatan Sipil	125.074.000	123.874.000	99,04
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	288.155.500	269.028.500	93,36
5	Program Informasi dan Komunikasi Publik	990.012.200	988.328.300	99,83

Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Realisasi kinerja keuangan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2021 adalah sebesar Rp 3.556.351.636 atau 90,46 % dari anggaran sebesar Rp 3.931.530.000.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp	3.556.351.636,00

2. Program Pendaftaran Penduduk

Realisasi kinerja keuangan Program Pendaftaran Penduduk Tahun 2021 adalah sebesar Rp16.1272.900,00 atau 98,11% dari anggaran sebesar Rp164.375.800,00

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI
1	Pelayanan pendaftaran penduduk	Rp	161.272.900,00

3. Program Pencatatan Sipil

Realisasi kinerja keuangan Program Pencatatan Sipil Tahun 2021 adalah sebesar Rp123.874.000 atau 99,04% dari anggaran sebesar Rp125.074.000

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp	123,874,000

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Realisasi kinerja keuangan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2021 adalah sebesar Rp269.028.500,00 atau 93,36% dari anggaran sebesar Rp288.155.500 ,00Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	96.578.000
2	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	68.000.000
3	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rp	104.450.500

5. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Realisasi kinerja keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di 12 Kecamatan Tahun 2021 adalah sebesar Rp988.328.300,00 atau 99,83% dari anggaran sebesar Rp.990.012.200,00

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	988.328.300,00

3.4 REALISASI ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Tapin yang dalam pelaksanaannya digunakan untuk memenuhi kinerja organisasi perangkat daerah dalam hal pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021. Secara rinci akan dijabarkan melalui tabel di bawah ini.

Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdayasaing

Tabel 31 Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2021	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN (%)
1 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1 Rata-rata lama sekolah (poin)	7,77	Program Pengelolaan Pendidikan	73.082.425.170	45.612.914.284	62,46
	2 Harapan lama sekolah (poin)	11,95	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11.449.900	6.439.200	56,24
	3 Rasio budaya baca (poin)	0,006481	Program Pembinaan Perpustakaan	597.850.700	582.567.268	97,44
2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 Angka Harapan Hidup (poin)	70,54	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	44.643.629.267	33.754.301.424	75,62
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	9515.931.800	8.359.334.973	87,85

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2021	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN (%)		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	860.688.700	524.377.600	60,93		
3	Meningkatnya daya beli Masyarakat	1	Pengeluaran per kapita (Rp) (dalam ribu)	11.952.000	Program Perencanaan dan Pembangunan	968.630.300	761.224.814	78,59
4	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	1	Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang diselesaikan (%)	100	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.017.394.700	1.930.276.400	95,68
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.165.369.400	1.148.867.200	98,58
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	55.799.600	42.399.800	75,99
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	75.229.600	43.214.600	57,44

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2021	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN (%)	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial	120.947.300	33.477.900	27,68	
5	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	84,15	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	142.326.100	74,08
					Program Perlindungan Perempuan	60.920.000	77,40
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	387.442.000	90,45
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	94.670.200	96,98
	2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	64,97	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	277.809.450	78,94	
				Program Perlindungan Khusus Anak	42.581.200	72,97	



Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2021	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN (%)	
1 Meningkatkan Sektor Agrobisnis	1 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	15,4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	238.149.000	211.878.500	88,97	
	2 Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	15	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.780.491.350	1.731.116.980	97,23	
	3 Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	18	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	157.504.600	147.839.600	93,86	
	4 Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6,82		3.7928/1870	3.490009431	92,01
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian			13.004.840.360	10.932.988.332	84,07

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2021	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN (%)
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	102.201.270	96.614.656	94,53
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	530.336.300	455.049.000	85,80
			Program Perizinan Usaha Pertanian	60.465.000	29.945.100	49,52
			Program Penyuluhan Pertanian	2623.751.100	2.398.328.786	91,22
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	699.493.000	450.465.59	64,38
			Program Pengendalian Izin	8.289.800	0	0
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industrial Nasional	707.135.500	553.462.900	78,27

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2021	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN (%)
2 Meningkatkan Sektor Pariwisata	1 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	246	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.621.364.472	2.509.316.810	95,73
			Program Pemasaran Pariwisata	300.504.200	219.103.000	72,91
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	63.552.300	49.018.000	77,13
3 Meningkatkan Sektor Koperasi dan UKM	1 Kontribusi sektor Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	127	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	12.699.800	12.699.800	100,00
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	6.549.800	-	0,00
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	27.799.800	27.540.000	99,07
			Program Pengembangan UMKM	52.597.500	6.569.500	12,49

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2021	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN (%)
4 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Indeks Desa Membangun (poin)	0,68	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.786.706.076	1.659.193.164	92,86
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	603.463.700	563.407.400	93,36
			Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.037.612.500	1.968.542.700	96,61
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.184.799.800		
5 Meningkatkan kemandirian pangan daerah	1 Skor Pola Pangan Harapan (poin)	88,4	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	3.544.411.300	3.468.152.048	97,85
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	78.950.200	74.669.500	94,58
			Program Penanganan Keamanan Pangan	36.299.000	35.871.000	98,82
6 Menurunkan Kemiskinan	1 Persentase penduduk miskin (%)	3,6	Program Pemberdayaan Sosial	3.300.398.300	3.096.185.100	93,81

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2021	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN (%)
		2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (poim)		2963670900	2305259300	77,78
		3	Indeks Keparahan Kemiskinan (poim)		1201760100	674087800	56,09
7	Menurunkan Pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	430653000	422493250	98,11
				Program Penempatan Tenaga Kerja	992738900	968929368	97,60
				Program Hubungan Industrial	163876400	141893300	86,59

Misi 3: Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2021	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN (%)
1 Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	1 Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	70,12	Program Penyelenggaraan Jalan	198.999.981.454	157.978.397.914	79,39
	2 Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	44				
2 Meningkatkan kualitas jaringan air bersih	1 Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih (%)	68,11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.820.226.000	10.490.612.265	96,95
3 Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	1 Luas areal sawah yang terairi (%)	17,08	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	870.000.000	862.829.000	99,18
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	51.155.626.902	46.852.508.316	91,59



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2021	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN (%)
4 Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan publik	1 Persentase bangunan gedung negara (gedung kantor dan gedung pelayanan publik) dalam kondisi baik (%)	83,77	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2530000000	2427891000	95,96
			Program Penataan Bangunan Gedung	239121461372	192292705684	80,42
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2312107472	2257183140	97,62
			Program Pengelolaan Pelayaran	831873100	714.789000	85,93
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9915274210	9844.007460	99,28
5 Meningkatkan ketersediaan jaringan komunikasi	1 Persentase desayang tersambung dengan jaringan komunikasi (%)	95,23	Program Aplikasi Informatika	496484000	479601907	95,60
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	990012200	988328300	99,83

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2021	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN (%)
6 Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTAW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	63,58	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	89.225.300	87.829.400	98,44
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KE-HATI)	2.133.096.000	2.043.196.300	95,79
			Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.023.681.092	973.814.880	95,13
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	46.726.500	34.167.700	73,12
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	29.653.400	27.459.900	92,60



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2021	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN (%)	
	2	Tingkat ketaatan terhadap RTRW (%)	80	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.624.399.400	1.610.148.917	99,12
7	1	Persentase rumah layak huni (%)	83,48	Program Pengembangan Perumahan	5.011.900.000	1.539.250.000	30,71
				Program Kawasan Permukiman	1.451.020.000	1.396.341.000	95,23
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.521.498.000	2.408.542.646	95,32
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	11.579.495.100	10.734.209.672	92,70

Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2021	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN (%)		
1	Meningkatnya keamanan daerah	1	Indeks rasa aman (poin)	0,65	Program Pelayanan Penanaman Modal	676.384.800	617.949.800	127,45

Misi 5: Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (Good And Clean Government)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2021	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN (%)		
1	meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1	Nilai SAKIP (predikat)	B	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.710.574.700	1.428.450.950	83,51
		2	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (predikat)	WIP	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	955.863.300	850.187.904	88,94
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	202.105.369.412	78.753.715.549	38,97	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2021	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN (%)		
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38910.753.122	36547.454.049	93,93		
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	367.275.600	314.264.600	85,57		
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	716.367.500	314.264.600	85,57		
2	Meningkatnya Kualitas ASN	1	Indeks Profesionalitas ASN (poin)	37/27	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.098.340.300	2.535.946.000	81,85
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin)	96,25	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	3.981.530.000	3.556.351.636	90,46
			Program Pendaftaran Penduduk	164.375.800	161.272.900	98,11		
			Program Pencatatan Sipil	125.074.000	123.874.000	99,04		
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	288.155.500	269.028.500	93,04		
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	99.001.200	98.832.8300	99,83		

3.5 DAFTAR PRESTASI TINGKAT NASIONAL/PROVINSI

A. TAHUN 2013 :

1. Penghargaan dari Presiden RI “Peningkatan Produksi Beras di Atas 5 % “ (Dinas Pertanian Kab Tapin)
2. Penghargaan JPIP Award grand Catagori Region in A Leading Breaktough On Economic Development (Dinas Pertanian Kab Tapin).
3. Penghargaan JPIP Award Grand Catagori Region in A Leading Breaktough On Equity Development Economic Development (Dinas Pertanian Kab Tapin).

B. TAHUN 2014 :

1. Peraih Best Effort Penilaian Adipura dari Kementerian dari Lingkungan Hidup yang diperoleh pada tahun 2014 untuk kategori kota kecil (Badan Lingkungan Hidup Kab Tapin).
2. Laboratorium dengan Klasifikasi A Se Kalimantan oleh Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan pada Tahun 2014 (Badan Lingkungan Hidup Kab Tapin).
3. Piagam penghargaan Kartha Adhi Dharma kepada Drs. HM. Arifin Arpan, MM atas jasa dalam membina dan memajukan Karang Taruna dari Menteri Sosial RI (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja)
4. Piagam penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas pemeriksaaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2014 (Jakarta, 28 Mei 2015) (Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Tapin).
5. Penghargaan pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Tapin).

C. TAHUN 2015 :

1. Piagam penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2015 (Jakarta 30 Mei 2016) (Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Tapin).

2. Piagam penghargaan The Jawa Post Institute Of pro Otonomi (JPIP) Area Kalimantan Selatan Tahun 2014 Kategori performe Politik “Safari Jum’at” dan kategori Parameter Khusus “Bawang Merah” Sabah Tahun 2015 (Dinas Pertanian Kab Tapin).
3. Penghargaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI atas upaya membina dan mengembangkan Kabupaten Tapin Menjadi Kabupaten Peduli Hak Assi Manusia (Jakarta, 10 Desember 2015) (Bagian Hukum setda Kab Tapin).
4. Peraih sertifikat Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup RI tahun 2015 untuk kategori Kota Kecil untuk yang kedua kalinya. (Badan Lingkungan Hidup Kab Tapin).
5. Peraih Adiwiyata Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup RI tahun 2015 untuk SMPN 1 Rantau (Badan Lingkungan Hidup Kab Tapin).
6. Harapan II Lomba Kelompok BKL Tingkat Nasional Tahun 2015 (Badan pemberdayaan Perempuan dan KB Kab Tapin).
7. Juara favorit Lomba kelompok UPPKS Tingkat Nasional Tahun 2015 (Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab Tapin).
8. Piagam Penghargaan diberikan kepada Syahrani desa sungai Rutas Ke. CLS Kab Tapin sebagai peserta Orientsi dan seleksi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2015 (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab Tapin).
9. Penghargaan **MANGGALA KARYA KENCANA** dari Kepala badan kependudukan dan KB Nasional kepada Ketua TP PKK Kab Tapin atas Prestasi yang menonjol dan Komitmen serta kepemimpinannya dalam menggerakkan Program Kependudukan, KB dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil bahagia sejahtera (Jakarta, 30 Juli 2015 0 (Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab Tapin).
10. Penghargaan **SATYALANCANA WIRA KARYA** dari Presiden RI H Joko Widodo di Tangerang (Jakarta, 1 Agustus 2015 (Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab Tapin).
11. Sertifikat Presiden Sukarno Heritage List Daftar Warisan-Warisan Presiden Soekarno atas sebuah situs Candi Hindu di Candi Laras (1 September 2015) (Disporanudpar Kab Tapin).
12. Penghargaan **SATYALANCANA** Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI atas jasa Dharma Bakti dalam memajukan kegiatan Koperasi dan Usaha kecil dan

Menengah DI Kupang NTT (Jakarta, 29 Mei 2015) (Disperindagkop dan UKM).

D. TAHUN 2016 :

1. Penghargaan Menteri Hukum dan HAM RI atas jasa upaya membina dan mengembangkan Kabupaten Tapin menjadi Kabupaten Peduli Hak asasi Manusia Pada Tahun 2015 (Surabaya, 5 Desember 2016) (Bagian Hukum Setda Kab Tapin).
2. Penghargaan ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA dari Menteri Pertanian RI tahun 2016 diberikan kepada Bupati Tapin atas Kontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan, Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan Nasional (Jakarta, 30 November 2016) (Badan Ketahanan Pangan Kab. Tapin).
3. Kementerian Pertanian memberikan Penghargaan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab Tapin sebagai pemenang lomba pencapaian target Luas Tanam Padi MT Oktober-Maret 2015/2016 (kelasA) (Jakarta, 17 Mei 2016).
4. Penghargaan Direktur Utama Badan penyelenggaraan Jaminan Sosial kesehatan, atas telah menjamin Rakyatnya Sehat dan Sejahtera melalui integritas Jamkesda dalam Program JKN-KIS pada Tahun 2016 (Jakarta, 21 November 2016).
5. Piagam Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas hasil pemeriksaan Laporan keuangan Pemerintah daerah TA. 2016 (Banjarbaru, 05 Juni 2017).
6. Penghargaan apresiasi dari kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB atas Sistem Inovasi Publik / Sinovic "Sungaiaku Bersih dan Sehat", Pemerintah Kab. Tapin prop. Kalsel sebagai TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 (Jakarta, 31 maret 2016). (Dinas Kesehatan Kab Tapin).
7. Penghargaan Piala Adipura Buana sebagai Kota Kecil terbersih diserahkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Siak, Pekanbaru (Jakarta, 22 Juli 2016). (Dinas Lingkungan Hidup Kab Tapin).
8. Penghargaan Tanda Kehormatan **SATYALENCANA PEMBANGUNAN KEBAKTIAN SOSIAL**, diberikan kepada Bupati Tapin ebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam lapangan Prikemanusiaan pada umumnya atau dalam suatu bidang Perikemanusiaan pada khususnya disematkan

- Presiden RI H. Joko Widodo di Palangkaraya 20 Desember 2016 (Jakarta, 19 Desember 2016) (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab Tapin).
9. Piagam Penghargaan Menteri Dalam Negeri RI kepada Pemerintah Kabupaten Tapin atas Komitmen dan Keberhasilannya dalam Penyelenggaraan Pelayanan Penerapan KTP-el, sehingga Kab Tapin berhasil mencapai target Penerbitan KTP-el, sesuai jumlah wajib KTP-el yang telah ditetapkan (Jakarta, 2 Maret 2016) (Badan Kependudukan dan catatan Sipil Kab Tapin).
 10. Penghargaan Sekolah adiwiyata Tingkat Nasional Oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI , kepada 2 sekolah :
 - a. SMAN 1 Rantau
 - b. MAN 1 Rantau
 11. Penghargaan Lomba Buah Unggulan Nasional Kategori Jeruk Manis (Siam) Juara II Tingkat Nasional Tahun 2016, Jeruk varietas Siam Banjar dari Kebun Tatang Rubiono.

E. TAHUN 2017 :

1. Peraih Penghargaan Piala Adipura Tahun 2017 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk Kategori Kota Kecil (Dinas Lingkungan Hidup Kab Tapin).
2. Penghargaan Menteri Hukum dan HAM RI atas upaya membina dan mengembangkan Kabupaten Tapin menjadi Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2016 diserahkan langsung Presiden RI H Joko Widodo (Solo, 10 Desember 2017). (Bagian Hukum Setda Kab Tapin).
3. Penghargaan Tanda Kehormatan **SATYALANCANA PEMBANGUNAN BIDANG PERTANIAN** Tahun 2017 dari Presiden RI Joko Widodo di Banda Aceh, 6 Mei 2017 (Dinas Pertanian Kab Tapin).
4. Penghargaan Tanda Kehormatan **SATYALANCANA PEMBANGUNAN BIDANG BKKBN** Tahun 2017 dari Presiden RI Joko Widodo di Lampung, 15 Juli 2017 (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab Tapin).
5. Piagam penghargaan kepada Karang Taruna Sinar Baru Kelurahan Bitahan Kec. Lokpaikat Kab. Tapin Teladan Utusan Propinsi Kalimantan Selatan Sebagai Peserta Orientasi dan Seleksi Karang Taruna (KT) Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2017 (Dinas Sosial Kab Tapin).

6. Penghargaan asuransi Jasindo kepada Pemerintah Kab Tapin atas tercapainya target Asuransi Usaha Tani padi (AUTP) tahun 2017 (Dinas Pertanian Kab Tapin).
7. Penghargaan 10 Kepala Daerah Teladan Se Indonesia Pilihan Majalah Tempo Tahun 2018, Jakarta 3 Maret 2017.
8. Peringkat III Kelompok Tani berprestasi bidang tanaman pangan Tingkat Nasional Tahun 2017 oleh Kelompok Tani Panggang Desa Bataratat Kec. Lokpaikat Kab Tapin (Dinas Pertanian).

F. TAHUN 2018

1. Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Tapin dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan capaian **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** , (Rantau, 22 Oktober 2018). (Dinas PPKAD Kab Tapin).
2. Penghargaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI atas **TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) Tahun 2018** Aplikasi e-Tamasa (Tapin Mandiri, Sejahtera dan Agamis) , Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi (Surabaya, 19 September 2018) (Bappelitbang Kab Tapin)
3. Penghargaan **Sertifikat Eliminasi Malaria Tahun 2018** dari Menteri Kesehatan RI di Surabaya, 11 Oktober 2018 (Dinas Kesehatan Kab Tapin).
4. Penghargaan Menteri Hukum dan HAM RI atas upaya membina dan mengembangkan Kabupaten Tapin menjadi **Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2018** diserahkan langsung Menteri Hukum dan HAM (Jakarta, 11 Desember 2018). (Bagian Hukum Setda Kab Tapin).

G. TAHUN 2019

1. Penghargaan LKBN Antara, **Pemerintah Kabupaten Tapin Pengembangan Cabai Hiyung**, Cabai Terpedas Nasional, (Banjarmasin, 9 Januari 2019)
2. Penghargaan **Adipura 2018** kepada Bupati Tapin yang diserahkan Bapak Wakil Presiden RI (Jakarta, 14 Januari 2019).

3. Penyerahan Laporan **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** dengan **Predikat B** Tahun 2019 yang diserahkan oleh Menteri PAN dan RB RI kepada Pemerintah Kabupaten Tapin ,(Banjarmasin, 6 Pebruari 2019).
4. Penghargaan **Pastika Parana** oleh Menteri Kesehatan RI dalam peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia Tahun 2019, (Jakarta, 11 Juli 2019).

H. TAHUN 2020

1. Penghargaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI atas **TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) Tahun 2020**, (Jakarta, 25 Nopember 2020)
2. Piagam Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas hasil pemeriksaan Laporan keuangan Pemerintah daerah TA. 2020 (Rantau)
3. Penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

I. TAHUN 2021

1. Penghargaan Top 45 Sinovik 2020 **“Cabai Rawit Hiyung Tapin Mendunia”**
Dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indoneisa

PENGHARGAAN TANDA JASA / SATYALANCANA:

1. Penghargaan Satyalencana Wira Karya , Tangerang 1 Agustus 2015
2. Penghargaan Satyalencana Bhakti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), NTT, 12 Juli 2016
3. Penghargaan Satyalencana Pembangunan Kebaktian Sosial di Palangkaraya, 20 Desember 2016
4. Penghargaan Satyalencana Pembangunan Bidang Pertanian , Banda Aceh, 6 Mei 2017
5. Penghargaan Satyalencana Pembangunan Bidang BKKBN , Lampung 15 Juli 2017

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tapin Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Tapin telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 23 (dua puluh tiga) Sasaran Strategis dan 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Utama.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tapin. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
3	55% s.d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja diketahui bahwa:

1. Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian Baik Sekali (BS) sebanyak 16 (enam belas) atau 47,06% IKU.
2. Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian Baik (B) sebanyak 12 (dua belas) atau 41,18% IKU.
3. Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian Cukup (C) sebanyak 4 (empat) atau 12% IKU.
4. Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian Kurang (K) sebanyak 2 (dua) atau 6% IKU.
5. Rata-rata capaian 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Kabupaten Tapin sebesar 93,64%.

Pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras sinergitas, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.


BUPATI TAPIN


Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Daerah
Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing

No	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	% serapan anggaran
1	Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin	1 Indeks pembangunan manusia (poin)	702	7031	100,16	1 Meningkatkan aksesabilitas dan kualitas pendidikan	14020	1 Rata-rata lama sekolah (poin)	8,72	7,77	89,11	Program Pengelolaan Pendidikan	73.032.425.170	45.612.914.284	62,46
								2 Harapan lama sekolah (poin)	13,34	11,95	89,58	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11.449.900	6.439.200	56,24
								3 Rasio budaya baca (poin)	0,002679	0,006481	241,92	Program Pembinaan Perpustakaan	597.850.700	582.567.268	97,44

No	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran
						21 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	98,20	1 Angka Harapan Hidup (poir)	71,83	70,54	98,20	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	44.643.629,267	33.754.301.424	75,62
												Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	95.159.318,00	83.593.349,73	87,85
												Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	860.688.700	524.377.600	60,93

No	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran		
						3	Meningkatnya daya beli Masyarakat	98,77	1	Pengeluaran per kapita (Rp) (dalam ribu)	12.746.150	11.952.000	93,77	Program Perencanaan dan Pembangunan	968.630.300	761.224.814	78,59
						4	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	117,65	1	Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang diselesaikan (%)	85	100	117,65	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	201.739.470	193.027.400	95,68

No	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran
												Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.165.369.400	1.148.867.200	98,58

No	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran
												Program Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	55.799.600	42.399.800	75,99
												Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	75.229.600	43.214.600	57,44

No	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	% serapan anggaran	
												Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial	120947.300	33477900	27,68	
						5	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	98,85	1	84,92	84,15	99,09	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	192128.900	142326100	74,08

No	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran	
								2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)				Program Perlindungan Perempuan	78.705.100	60.920.000	77,40	
													Program Peningkatan Kualitas Keluarga	428.364.900	387.442.000	90,45
													Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	97.617.100	94.670.200	96,98
												Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	351.913.200	277.809.450	78,94	

No	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	% serapan anggaran
												Program Perlindungan Khusus Anak	59503500	42581200	71,56

Lampiran 2. Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Daerah
Misi 2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata yang Dimulai dari Desa

No	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran
1	Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah	1 Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	52	341	60,89	1 Meningkatkan Sektor Agrobisnis	80,81	1 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	2353	154	65,45	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	238.149.000	211.878.500	88,97
		2 Indeks Gini (point)	0,29	0,27	98,10			2 Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	2,7	1,5	55,56	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.780.491.350	1.731.116.930	97,23
		3 Indeks Ketimpangan Regional (point)	0,29	0,27	98,10			3 Kontribusi sektor perikanan terhadap	1,6	1,8	112,50	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil	157.504.600	147.839.600	93,86

Nb	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	% serapan anggaran
		4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	6.635.069	6.575.521,31	99,10			4 Produk PDRB (%)	76	682	89,74	Perikanan			
								4 Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.792.871.870	3.490.009.431	92,01

Nb	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran
		5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	8366214	904732743	108,14							Program Penyediaan dan Pengembangan Pasarana Pertanian	13.004840.360	10.932988.332	84,07
												Program Pengendalian Kesehatan Hewan	102.201270	96.614656	94,53

Nb	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran
												dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
												Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	530336.300	455049.000	85,80
												Program Perizinan Usaha Pertanian	604650.00	299451.00	49,52
												Program Penyuluhan Pertanian	2623.751.100	2398328.786	91,22
												Program Perencana	6994980.00	4508465.59	64,38

Nb	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran
												andan Pembangunan Industri			
												Program Pengendalian izin	8289800	0	0
												Program Pengelolaan Sistem Informasi Industrial Nasional	707135500	553462900	78,27
						2 Meningkatkan Sektor Pariwisata	70,29	1 Kontribusi sektor pariwisata terhadap	35	246	70,29	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	2621364472	2509316810	95,73

Nb	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran
								pPDRB (%)				Parwisata			
												Program Pemasaran Pariwisata	300504.200	219103.000	72,91
												Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	63552300	49018000	77,13
						3 Meningkatkan Sektor Koperasi dan UKM	84,67	1 Kontribusi sektor Koperasi dan UKM	15	127	84,67	Program Pengawasan dan Pemeriks	12.699800	12.699800	100,00

Nb	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran
								terhadap PDRB (%)				aan Koperasi			
												Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	6549800	-	0,00
												Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	27.799800	27540000	99,07
												Program Pengembangan UMKM	52597500	65695000	1249

Nb	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	% serapan anggaran
						4 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1172,4	1 Indeks Desa Membangun (idm)	0,58	0,68	117,24	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.786.706,076	1.659.193.164	92,86
												Program Administrasi Pemerintahan Desa	603.463.700	563.407.400	93,36
												Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.037.612.500	1.968.542.700	96,61

Nb	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran		
												Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.184.799.800				
						5	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	101,61	1	Skor Pola Pangan Harapan (pph)	87	884	101,61	Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan	3.544.411.300	3.468.152.048	97,85
												Program Penanganan Kerawanan Pangan	789.502.000	746.695.000	94,58		
												Program Penanganan	362.990.000	358.710.000	98,82		

Nb	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran	
												Kemaran Pangan				
						6	81,68	1	Persentase penduduk miskin (%)	3,55	3,6	101,41	Program Pemberdayaan Sosial	3300393300	3096185100	93,81
								2	Indeks Kecelakaan Kemiskinan (point)	0,44	0,28	63,64	Program Rehabilitasi Sosial	2963670900	2305259300	77,78
								3	Indeks Keparahannya Kemiskinan (point)	0,05	0,04	80,00	Program Perlindungan Jaminan Sosial	1201760100	674087800	56,09
						7	137,78	1	Tingkat Pengangguran	3,6	4,96	137,78	Program Pelatihan Kerjadan Produktivitas	480653000	422493250	98,11

Nb	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran
								Terbuka (%)				as Tenaga Kerja			
												Program Penempatan Tenaga Kerja	992.738.900	968.929.368	97,60
												Program Hubungan Industrial	163876.400	141.893.300	86,59

Lampiran 3. Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Daerah
Misi 3 Memantapkan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Secara Berkelanjutan

Nb	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur	1 Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap (%)	55,33	55,79	100,83	1 Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	91,05	1 Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	66	70,12	106,24	Program Penyelenggaraan Jalan	198.999.981.454	157.978.397.914	79,39
								2 Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	58	44	75,86				
								2 Meningkatkan kualitas jaringan air bersih	60	68,11	113,52	Program Pengelolaan dan Pengembangan	108.202.600	104.906.122,65	96,95

Nb	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 202	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran
								mengakses air bersih (%)				Sistem Penyediaan Air Mlum			
						3 Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	24,06	1 Luas areal sawah yang terairi (%)	71	17,08	24,06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	87000000	86282900	99,18
												Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	51.155.626.902	46.852.508.316	91,59

Nb	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran		
						4 Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan publik	83,77	1 Persentase bangunan gedung negara (gedung kantor dan gedung pelayanan publik) dalam kondisi baik (%)	48	40,21	83,77	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2530000.000	2427891.000	95,96		
														Program Penataan Bangunan Gedung	239.1214.61372	192.2927.05684	80,42
															Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2312.107.472	2257.183.140

No	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran
												Program Pengelolaan Pelayaran	831873100	714.789000	85,98
												Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9915274210	9844.007460	99,28
						5 Meningkatkan ketersediaan jaringan komunikasi	101,31	1 Persentase desa yang tersambung dengan jaringan komunikasi (%)	94	95,23	101,31	Program Aplikasi Informatika	496484000	479601907	96,60

Nb	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran
												Program Informasi dan Komunikasi Publik	990012200	988328300	99,83
2	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1 Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	269	8,66	321,93	1 Meningkatkan pengelolaan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	121,47	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poi)	54829	63,58	115,96	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	89225300	87829400	98,44

Nb	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 202	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran
												Program Pengelolaan Kendaraan Hayati (KE-HATI)	2.133.096.000	2.043.196.300	95,79
												Program Pengendalian Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.023.681.092	973.814880	95,13
												Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan	46.726.500	34.167.700	73,12

No	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran
												Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)			
												Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	29.653.400	27.459.900	92,60

No	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran
								2 Tingkat ketaatan terhadap RTRW (%)	68	80	12,98	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.624.399.400	1.610.148.917	99,12
						2 Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan	85,21	1 Persentase rumah layak huni (%)	97,98	83,48	85,21	Program Pengembangan Perumahan	5.011.900.000	1.539.250.000	30,71
												Program Kawasan Pemukiman	1.451.020.000	1.396.341.000	96,23
												Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.521.498.000	2.408.542.646	95,32

Nb	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran
												Program Peningkatan Prasarana, Saranadan Utilitas Umum (PSU)	115.979.5100	10.734.209.672	92,0

Lampiran 4. Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Daerah
Misi 4 Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif Demi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Nb	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran
1	Meningkatnya investasi	1 Laju pertumbuhan investasi daerah (%)	55	30,13	54,78	1 Meningkatkan keamanandanberh	127,45	1 Indeksrasaaman (poin)	0,51	0,65	127,45	Program Pelayanan Peranman Modal	676384.800	617949.800	127,45

Lampiran 5. Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Daerah
Misi 5 Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (Good and Clean Government)

Nb	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran
1	Tewujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Meyakinkan Masyarakat	1 Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi (poi)	_*	_*	_*	1 meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan	100	1 Nilai SAKP (predikat)	B	B	100%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.710574.700	1.428450.950	83,51

Nb	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran
								2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (predikat)	WIP	WIP	100%	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	955.863.300	850.187.904	88,94
												Program Pengelolaan Keuangan Daerah	202.105.369.412	78.753.715.549	38,97
												Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	389.107.531.22	365.474.540.9	93,93

Nb	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran
												Program Penyelenggaraan Pengawasan	367275600	314264600	85,57
												Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	716367500	314264600	85,57
						2 Meningkatkan Kualitas ASN	37,65	1 Indeks Profesionalitas ASN (point)	99	3727	37,65	Program Pengerbangan Sumber Daya Manusia	3098340300	2535946000	81,85
						3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan	118,83	1 Nilai Survey Kepuasan	81	9625	118,83	Program Penyelenggaraan Pemerintah	3931530000	3556351636	90,46

Nb	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran
						npada Masyarakat		Masyarakat (Poin)				randan Pelayanan Publik			
												Program Pendaftaran Penduduk	164375800	161272900	98,11
												Program Pencatatan Sipil	125074000	123874000	99,04
												Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	288155500	123874000	99,04
												Program Informasi dan Komunikasi	990012200	988328300	99,83

Nb	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Sasaran strategis	% capaian sasaran	Indikator kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian kinerja	Program	Pagu anggaran (rp)	Realisasi anggaran (rp)	% serapan anggaran
												Publik			



Lampiran 6. Surat Keputusan Bupati Tapin tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/ 224/KUM/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);



23. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tapin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan untuk:

- perencanaan jangka menengah;
- perencanaan tahunan;
- penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- pelaporan akuntabilitas kinerja;
- evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/187/KUM/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tapin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 22 Oktober 2021

BUPATI TAPIN,


M. ARIFIN ARPAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.



INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUNAN (SATUAN)	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB / PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin		Indeks pembangunan manusia (ipm)	IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM = (jarak pangkat 3 dari (indeks kesehatan x indeks pendidikan x indeks pengunarnan) x 100 $IPM = \sqrt[3]{\text{Kesehatan} \times \text{Pendidikan} \times \text{Pengeluaran}}$			
		Sasaran 1: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (jps)	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{k=1}^{K_{15+}} (Lama sekolah penduduk ke - i)$ dimana: P ₁₅₊ = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas Lama sekolah penduduk ke - i a. Tidak pernah sekolah = 0 b. Masih sekolah di SD sampai dengan XI = konversi kelas terakhir + kelas terakhir - 1 c. Masih sekolah di XII/3 = konversi kelas terakhir + konversi kelas terakhir d. Tidak bersekolah lagi dan tercatat di kelas terakhir = konversi kelas terakhir e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tercatat di kelas terakhir = konversi kelas terakhir + kelas terakhir - 1	Didik	SFS Data Dinas Pendidikan	
			Harapan lama sekolah (jps)	$Formula \rightarrow HSL = FN \times \sum_{i=1}^m \frac{E_i}{P_i^2}$ dimana: HSL ₁₅₊ = Harapan lama sekolah penduduk ke-15 tahun + E _i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P _i = Jumlah penduduk usia i pada tahun t FN = 10000, m = 1, ..., 15 Kelas bersekolah berdasarkan	Didik	SFS Data Dinas Pendidikan	
			Rasio budaya baca (jps)	Pemustaka (penguji/pembaca)/jumlah penduduk	Dipustarung	Data Dipustarung	

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUNAN (SATUAN)	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB / PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET
		Sasaran 2: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (jps)	$\frac{\text{jumlah umur yang meninggal dalam 1 tahun}}{\text{jumlah orang yang meninggal dalam 1 tahun}} = \text{AMH}$	Dikes	SFS Data Dinas Kesehatan	
		Sasaran 3: Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp)	Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dibutuhkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebuah bhay dengan besarnya anggota rumah tangga Rumus : $Y^{**} = \frac{Y^*}{PPP} \quad Y^* = \frac{Y}{IHK} \times 100$ dimana: Y** = Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Y* = Pengeluaran per kapita harga konstan Y = Pengeluaran per kapita setahun IHK = Indeks Harga Konsumen tahun dasar 2012	Bagan Elobang	SFS dan data Bagan Elobang	
		Sasaran 4: Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat	Persentase potensi dasar/kegiatan sosial yang dilaksanakan (%)	Jumlah Korrib Sosial Yang Dapat Duitas ----- x 100 Jumlah Korrib Sosial	Balesbanggol	Data Balesbanggol	
		Sasaran 5: Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (jps)	Meningkatnya Kualitas Pemetaan yang berupa C Teranganya perempuan ----- x 100 C Jumlah tenaga ahli laki	DP3A	SFS dan data DP3A	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (jps)	1/3 (per = IDM - lino-dini) (per IDM lino-dis = Indeks Keterwakilan di parlemen = Indeks pengambilan keputusan + Indeks distribusi pendapatan	DP3A	SFS dan data DP3A	

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUNAN (SATUAN)	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB / PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET
Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agribisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa	Tujuan 1: Meningkatkan kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah		Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang tertentu $\text{FORB } t - \text{FORB}(t-1) \quad \text{FORB}(t-1) \times 100$ ket t = tahun berjalan t-1 = tahun sebelumnya tahun t			
		Sasaran 1: Meningkatkan Sektor Agribisnis	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRE (%)	(Jumlah PDRE Sektor Pertanian tahun ke - n) / (Jumlah PDRE sektor Pertanian tahun ke n-1) ----- x 100 (Jumlah PDRE sektor Pertanian tahun ke n-1)	Dinas Pertanian	SFS dan data Dinas Pertanian	
			Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRE (%)	(Jumlah PDRE Sektor Peternakan tahun ke - n) / (Jumlah PDRE sektor Peternakan tahun ke n-1) ----- x 100 (Jumlah PDRE sektor Peternakan tahun ke n-1)	Dinas Pertanian	SFS dan data Dinas Pertanian	
			Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRE (%)	(Jumlah PDRE Sektor Perikanan tahun ke - n) / (Jumlah PDRE sektor Perikanan tahun ke n-1) ----- x 100 (Jumlah PDRE sektor Perikanan tahun ke n-1)	Dinas Perikanan	SFS dan data Dinas Perikanan	
			Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRE (%)	(Jumlah PDRE Sektor Perindustrian tahun ke - n) / (Jumlah PDRE sektor Perindustrian tahun ke n-1) ----- x 100 (Jumlah PDRE sektor Perindustrian tahun ke n-1)	Dinas Perindustrian	SFS dan data Dinas Perindustrian	
		Sasaran 2: Meningkatkan Sektor Perumaha	Kontribusi sektor perumaha terhadap PDRE (%)	(Jumlah PDRE Sektor Perumahan tahun ke - n) / (Jumlah PDRE sektor Perumahan tahun ke n-1) ----- x 100 (Jumlah PDRE sektor Perumahan tahun ke n-1)	Dibudpar	SFS dan data Dibudpar	



MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUNAN (SATUAN)	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB / PENYUMBANG	SUMBER DATA	KEF
		Sasaran 1. Meningkatkan Sektor Koperasi dan UKM	Kontrolisi sektor Koperasi dan UKM terhadap PDPS (%)	$\frac{\text{Jumlah PDPS Sektor Koperasi dan UKM tahun } (n-1) - (\text{Jumlah PDPS Sektor Koperasi dan UKM tahun } n-1)}{\text{Jumlah PDPS Sektor Koperasi dan UKM tahun } (n-1)} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah PDPS Sektor Koperasi dan UKM tahun } (n-1)}{\text{Jumlah PDPS Sektor Koperasi dan UKM tahun } (n-1)} \times 100$	Dinas Perindustrian	SFS dan Data Dinas Perindustrian	
		Sasaran 4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	<p>IDM merupakan indeks komposit yang dihasilkan dari rata-rata Indeks Keterlaksanaan Desa (IKD), Indeks Keterlaksanaan Ekonomi (IKE) dan Indeks Keterlaksanaan Sosial (IKS) setiap desa.</p> <p>Formulasi Indeks Desa Membangun (IDM)</p> $IDM = \frac{1}{3} (IKD + IKE + IKS)$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> IKD -- Indeks Keterlaksanaan Desa IKS -- Indeks Keterlaksanaan Sosial IKD -- Indeks Keterlaksanaan Lingkungan (IKDL) IKS -- Indeks Keterlaksanaan Ekonomi (IKSE) IKS -- Indeks Keterlaksanaan Sosial (IKSS) <p>Setiap indeks dibangun dari sejumlah variabel, dan setiap variabel diturunkan ke dalam parameter indikator. Setiap indikator memiliki skor 0-100. 0, indikator tidak atau minimally memiliki makna yang positif. Total skor dihitung dirata-ratakan dan dalam indeks dibagi nilai 0-1.</p> $IKD = \frac{1}{3} (IKDL + IKSE + IKSS)$ <p>0 = Komponen indeks yang terdiri dari: Indeks Keterlaksanaan Lingkungan (IKDL), Indeks Keterlaksanaan Ekonomi (IKSE) dan Indeks Keterlaksanaan Sosial (IKSS)</p> <p>0 = Indikator (0)</p>	- DPM - DPKK - DPUPR	Data DPM, DPKK dan DPUPR	
		Sasaran 3. Meningkatkan Ikutsertaan warga daerah	Skor Pola Pangan Harapan (pph)	<p>Menghitung Total Skor Pola Pangan Harapan. Total skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang diperoleh dengan kualitas konsumsi pangan adalah jumlah dari skor 9 kelompok pangan, yaitu jumlah dari kelompok padi-padias, smpas dengan skor kelompok lain-lain. Angka ini dikurusi skor PPH konsumsi pangan, yang menunjukkan tingkat ketahanan konsumsi pangan.</p> <p>Skor PPH = (skor PPH kelompok padi-padias + umbi-umbian + ... + skor PPH kelompok lain-lain)</p>	DNF	Data DNF	

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUNAN (SATUAN)	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB / PENYUMBANG	SUMBER DATA	KEF
		Sasaran 6. Meningkatkan Kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)	<p>Head Count Index (HCI-PI), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK) Rumah.</p> $P_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{Y_j - Y_k}{Y_k}$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> $n = 0$ n = garis kemiskinan Y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita seluruh penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q, q < n) q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk 	Dinas Sosial	SFS dan Data Dinas Sosial	
			Indeks Ketahanan Kemiskinan	Indeks Ketahanan Kemiskinan (Fovary Gap Index-FI) merupakan ukuran rata-rata besarnya pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.	Dinas Sosial	SFS dan Data Dinas Sosial	
			Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan (Fovary Severity Index-FI) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.	Dinas Sosial	SFS dan Data Dinas Sosial	
		Sasaran 7. Meningkatkan Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka (%)	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	- Dinas Tenaga Kerja - Kecamatan	SFS, Data Dinas Tenaga Kerja dan Data Kecamatan	

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUNAN (SATUAN)	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB / PENYUMBANG	SUMBER DATA	KEF
Misi 3: Menetapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas infrastruktur		Persentase infrastruktur dalam kondisi siap (%)				
		Sasaran 1. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi siap (%)	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi siap dan berkelengkapan}}{\text{Total Panjang jalan}} \times 100\%$	DPUPR	Data DPUPR	
			Persentase jembatan dalam kondisi siap (%)	$\frac{\text{Panjang jembatan kondisi siap}}{\text{Total jembatan}} \times 100\%$	DPUPR	Data DPUPR	
		Sasaran 2. Meningkatkan kualitas jaringan air bersih	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih (%)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk berakses air bersih}}{\text{Jumlah total penduduk}} \times 100$	DPUPR	Data DPUPR	
		Sasaran 3. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	Duas areal sawah yang teririgasi (%)	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik fungsional}}{\text{Total panjang saluran irigasi}} \times 100$	DPUPR	Data DPUPR	
		Sasaran 4. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik	Persentase bangunan gedung smpas (gedung Kantor dan gedung pelayanan publik) dalam kondisi baik (%)	$\frac{\text{Jumlah gedung/kantor pelayanan publik dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah gedung/kantor pelayanan publik}} \times 100$	- DPUPR - Dispora - Dishub	Data DPUPR, Dispora dan Dishub	
		Sasaran 5. Meningkatkan ketersediaan jaringan komunikasi	Persentase desa yang tersambangi dengan jaringan komunikasi (%)	$\frac{\text{Jumlah Desa yang tersambangi jaringan komunikasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	Diskominfo	Data Diskominfo	



MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUNAN (SATUAN)	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB / PENURUNG	SUMBER DATA	KET
	Tujuan 2: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IQLH)	Peningkatan Angka IQLH menunjukkan semakin baiknya kualitas Lingkungan Hidup			
		Sasaran 1: Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan BTRW dan penerap pemukiman berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IQLH)	$\text{Rumus: IQLH} = \frac{\text{IQA} + \text{IKU} + \text{IKS} + \text{IKK}}{4}$ IQLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IQA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKS = Indeks Kesehatan IKK = Indeks Kehutanan	DLM	Data DLM	
			Tingkat pemetaan terhadap BTRW (%)	Realisasi BTRW $\frac{\text{Realisasi Perumahan sesuai BTRW}}{\text{Rencana Perumahan sesuai BTRW}} \times 100$	DPUPR	Data DPUPR	
		Sasaran 2: Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan	Persentase rumah layak huni (%)	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah total keseluruhan rumah}} \times 100$	Disperumahan	Data Disperumahan	
Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat							
	Tujuan 1: Meningkatkan investasi		Laju pertumbuhan investasi daerah (%)	Total Akumulatif angka realisasi investasi daerah pada tahun ke n di banding tahun dasar			
		Sasaran 1: Meningkatkan komitmen daerah	Indeks rasa aman (IRA)	Hasil survey Indeks Rasa Aman (IRA)	- Satpol PP dan Kebakaran - DP/PTSP - BPSD	Data Hasil Survey	

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUNAN (SATUAN)	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB / PENDEKUNG	SUMBER DATA	KET
Misi 5: Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).							
	Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat		Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi (IPRB)	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengingkat 60% dan hasil 40%			
		Sasaran 1: Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan keuangan	Nilai SAKIP (predikat)	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten dan Kecamatan RB	- Bepolitehang - Inspektoran - Bagian Organisasi - Seluruh SKPD	Keuangan RB	
			Open SPK atas Laporan Keuangan Pemda (predikat)	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah	- Inspektoran - BPKAD - Seluruh SKPD	LHP BPK	
		Sasaran 2: Meningkatkan kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (IPA)	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	BKPSDM	Kepegawaian RB	
		Sasaran 3: Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Survei tingkat kepuasan pelayanan sesuai dengan Peraturan Nomor 16 Tahun 2014	DP/PTSP - Disdikpora - Disdikpora - Bagian Organisasi - Kecamatan	Data Hasil Survey SKM	

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN



Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021



BUPATI TAPIN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka memujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM**

JABATAN : **BUPATI TAPIN**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kapitan, 22 Oktober 2021
Bupati Tapin,

Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	T1: Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin	Indeks pembangunan manusia (poin)	Poin	70,2
	T1.S1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	a. Rata-Rata Lama Sekolah (poin)	Poin	8,72
		b. Harapan Lama Sekolah (poin)	Poin	13,34
		c. Rasio Budaya Baca (poin)	poin	0.002679
	T1.S2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (poin)	poin	71,83
	T1.S3. Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita disesuaikan (Rp)	Rupiah	1.274.615
	T1.S4. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial keagamaan	Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang diselesaikan (%)	Persentase	85
T1.S5. Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	poin	84,92	
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	poin	73,32	
2	T2: Meningkatkan kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan Ekonomi(%)	Persentase	5,2
		a. Indeks Gini (poin)	poin	0,29
		b. Indeks Ketimpangan Regional (poin)	poin	0,29
		c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	Rupiah	6.635.069
	d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	Rupiah	8.366.214	
	T2.S6. Meningkatkan sektor Agrobisnis	a. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	persentase	23,53
		b. Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	persentase	2,7
		c. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	persentase	1,6
		d. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	persentase	7,6
	T2.S7. Meningkatkan sektor pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	persentase	3,5
T2.S8. Meningkatkan sektor Koperasi dan UMKM	Kontribusi sektor Koperasi dan UMKM terhadap PDRB (%)	persentase	1,5	
T2.S9. Meningkatkan Pemberdayaan	Indeks Desa Membangun (poin)	poin	0,58	



NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
	Masyarakat Desa			
	T2.S10. Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Skor pola pangan harapan (poin)	poin	87
	T2.S11. Menurunnya Kemiskinan	a. Persentase penduduk miskin (%)	persentase	3.55
		b. Indeks kedalaman kemiskinan (poin)	poin	0.44
		c. Indeks keparahan Kemiskinan (poin)	poin	0.05
	T2.S12. Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka (%)	persentase	3.6
3	T3: Meningkatkan kualitas infrastruktur	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap (%)	Persentase	55.33
	T3.S13. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	a. Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	persentase	66
		b. Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	persentase	58
	T3.S14. Meningkatnya kualitas jaringan air bersih	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih	persentase	60
	T3.S15. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Luas areal sawah yang terairi (%)	persentase	71
	T3.S16. Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik	Persentase bangunan gedung/kantor negara (pelayanan publik) dalam kondisi baik	persentase	48
	T3.S17. Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi	Persentase desa yang tersambung dengan jaringan komunikasi (%)	persentase	94
4	T4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup (%)	Persentase	2.69
	T4.S18. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	a. Indeks kualitas lingkungan hidup (poin)	poin	54.829
		b. Tingkat ketaatan terhadap RTRW (%)	persentase	63
	T4.S19. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan	Persentase rumah layak huni (%)	persentase	97.98
5	T5: Meningkatkan Investasi	Laju pertumbuhan investasi daerah (%)	Persentase	5.5
	T5.S20. Meningkatnya keamanan daerah	Indeks rasa aman (point)	poin	0.51
6	T6: Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan	Indeks persepsi Reformasi Birokrasi (poin)	poin	CC



NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
	melayani masyarakat			
	T6.S21. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	a. Nilai SAKIP (Predikat)	predikat	B
		b. Opini BPK atas Laporan keuangan Pemda (Predikat)	predikat	WTP
	T6.S22. Meningkatnya kualitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	poin	99
	T6.S23. Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Nilai survey kepuasan masyarakat (Poin)	poin	81



NO	PROGRAM PER SASARAN	ANGGARAN (Rp)
I	MENINGKATNYA AKESABILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN	
1	Program Pengelolaan Pendidikan	73.032.425.170
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11.449.900
3	Program Pembinaan Perpustakaan	597.850.700
II	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	44.643.629.267
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.515.931.800
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	860.688.700
III	MENINGKATNYA DAYA BELI MASYARAKAT	
7	Program Perekonomian dan Pembangunan	968.630.300
IV	MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN	
8	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.017.394.700
9	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.165.369.400
10	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	55.799.600
11	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	75.229.600
12	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial	120.947.300
V	MENINGKATNYA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN GENDER	
13	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	192.128.900
14	Program Perlindungan Perempuan	78.705.100
15	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	428.364.900
16	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	97.617.100
17	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	351.913.200
18	Program Perlindungan Khusus Anak	58.355.900



NO	PROGRAM PER SASARAN	ANGGARAN (Rp)
VI	MENINGKATNYA SEKTOR AGROBISNIS	
19	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	238.149.000
20	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.780.491.350
21	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	157.504.600
22	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.792.871.870
23	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	13.004.840.360
24	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	244.047.070
25	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	530.336.300
26	Program Perizinan Usaha Pertanian	60.465.000
27	Program Penyuluhan Pertanian	2.623.751.100
28	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.302.722.000
29	Program Pengendalian Izin	143.183.600
30	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industrial Nasional	149.114.300
VII	MENINGKATNYA SEKTOR PARIWISATA	
31	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.580.610.372
32	Program Pemasaran Pariwisata	300.504.200
33	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	63.552.300
VIII	MENINGKATNYA SEKTOR KOPERASI DAN UKM	
34	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	12.699.800
35	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	6.549.800
36	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	27.799.800
37	Program Pengembangan UMKM	52.597.500
IX	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
38	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.786.706.076
39	Program Administrasi Pemerintahan Desa	603.463.700
40	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.037.612.500
41	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.184.799.800



NO	PROGRAM PER SASARAN	ANGGARAN (Rp)
X	MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH	
42	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	3.544.411.300
43	Program Penanganan Kerawanan Pangan	78.950.200
44	Program Penanganan Keamanan Pangan	36.299.000
XI	MENURUNNYA KEMISKINAN	
45	Program Pemberdayaan Sosial	3.300.393.300
46	Program Rehabilitasi Sosial	2.963.670.900
47	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.201.760.100
XII	MENURUNNYA PENGANGGURAN	
48	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	430.653.000
49	Program Penempatan Tenaga Kerja	992.738.900
50	Program Hubungan Industrial	163.876.400
XIII	MENINGKATNYA KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	
51	Program Penyelenggaraan Jalan	199.399.981.454
XIV	MENINGKATNYA KUALITAS JARINGAN AIR BERSIH	
52	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.820.226.000
XV	MENINGKATNYA KUALITAS JARINGAN IRIGASI	
53	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	870.000.000
54	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	50.755.626.902
XVI	MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK	
55	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2.530.000.000
56	Program Penataan Bangunan Gedung	239.121.461.372
57	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.312.107.472



NO	PROGRAM PER SASARAN	ANGGARAN (Rp)
58	Program Pengelolaan Pelayaran	831.873.100
59	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	10.154.051.300
XVII	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN JARINGAN KOMUNIKASI	
60	Program Aplikasi Informatika	496.484.000
61	Program Informasi dan Komunikasi Publik	929.635.000
XVIII	MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN YANG MEMPERHATIKAN RTRW DAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	
62	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	89.225.300
63	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.133.096.000
64	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.023.681.092
65	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	46.726.500
66	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	29.653.400
67	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.624.399.400
XIX	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN PERUMAHAN	
68	Program Pengembangan Perumahan	5.011.900.000
69	Program Kawasan Permukiman	1.451.020.000
70	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.521.493.000
71	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	11.579.495.100
XX	MENINGKATNYA KEAMANAN DAERAH	
72	Program Pelayanan Penanaman Modal	778.720.000
XXI	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	
73	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.648.574.700
74	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	957.663.300



NO	PROGRAM PER SASARAN	ANGGARAN (Rp)
75	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	202.105.369.412
76	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39.965.805.436
77	Program Penyelenggaraan Pengawasan	367.275.600
78	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	716.367.500
XXII	MENINGKATNYA KUALITAS ASN	
79	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	376.014.000
XXIII	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT	
80	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	735.585.000
81	Program Pendaftaran Penduduk	164.375.800
82	Program Pencatatan Sipil	125.074.000
83	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	288.155.500
84	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.001.442.600

Rantau, 22 Oktober 2021

Bupati Tapin,



Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM